

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Myanmar adalah sebuah Negara yang dipimpin oleh sebuah rezim diktator yang memperoleh kekuasaannya lewat kudeta pada tahun 1962. Semenjak adanya peralihan kekuasaan kepada militer seluruh aspek yang ada di Myanmar juga telah diambil alih oleh militer. Junta militer tidak hanya menguasai aspek pemerintahan tetapi juga menguasai seluruh aset perekonomian di Myanmar. Kebijakan – kebijakan Junta militer yang seringkali memancing kemarahan dunia internasional seperti banyaknya kekerasan yang digunakan oleh Junta militer setiap kali melihat adanya perlawanan pada pemerintahannya. Oleh karena itu rezim militer Myanmar dikenal sebagai rezim yang memiliki pelanggaran HAM yang tinggi dikawasan Asia Tenggara.

Adanya kecaman – kecaman dari luar tidak membuat Myanmar bersifat lebih terbuka. Hal ini malah mendorong Myanmar untuk cenderung menutup diri dari dunia luar. Karena sikapnya yang cenderung menutup diri maka politik Myanmar dinilai bersifat Isolatif. Oleh karena itu arus informasi yang berasal dari Myanmar pun sangat sulit untuk didapatkan. Kecenderungan politik Myanmar yang bersifat Isolatif ini disebabkan adanya kepentingan – kepentingan militer yang menguasai Myanmar. Penguasaan militer yang sangat besar terhadap ekonomi Myanmar

membuat adanya kekhawatiran terhadap intervensi asing yang akan menggoyahkan kekuasaan Junta. Selain itu juga karena adanya kepentingan – kepentingan asing yang mendukung kepemimpinan Junta militer di Myanmar.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini dimana setiap Negara saling berhubungan serta adanya sistem pasar bebas, Myanmar malah memilih untuk bertahan dengan politiknya yang Isolatif. Oleh karena itu penulis menganggap masalah ini sangatlah menarik dan penting untuk dikaji dalam perpolitikan. Dalam kesempatan ini penulis memilih judul **“KEPENTINGAN MILITER DIBALIK POLITIK ISOLATIF MYANMAR”**

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Myanmar merupakan Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan telah menjadi salah satu anggota ASEAN sejak tahun 1967. Berdasarkan letak geografisnya Myanmar berada di Kawasan Asia Tenggara dan dikelilingi oleh lima negara dengan keanekaragaman yang berbeda – beda, kelima Negara tersebut adalah Cina, Bangladesh, Thailand, Vietnam dan India. Negara yang dulu bernama Burma ini dipimpin oleh rezim militer yaitu Junta Militer. Militer berkuasa di Burma sejak Jenderal Ne Win memimpin kudeta yang menggulingkan pemerintahan demokratis dibawah U Nu, pada tahun 1962.¹ Sejak dipimpin oleh rezim diktator rakyat Myanmar hidup dalam dalam penderitaan, hal ini menyebabkan banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Myanmar sendiri terhadap pemerintahan Junta militer yang

¹ <http://www.vhrmedia.com/berita-suara.phpri>, diakses 7 Desember 2008

berkuasa. Rakyat Burma tidak tahan hidup dibawah ancaman senjata. Protes terhadap pemerintahan Junta militer meledak pada tahun 1988 ketika demonstrasi pro demokrasi besar – besaran pada 8 Agustus 1988 dan mulai di kenal dengan 8888.²

Politik Luar Negeri Myanmar dipengaruhi beberapa faktor penting. Pertama adalah sejarah. Sejarah Myanmar, dulu disebut Burma, penuh dengan perang yang nyaris tanpa henti. Proses pembentukan Myanmar secara tradisional berlangsung ditengah peperangan antar kelompok. Disamping itu, Myanmar dimasa lalu juga berhadapan dengan invansi dari luar yang dilakukan oleh pasukan Mongol, Cina dan juga Inggris. Kedua, pada era modern Myanmar berhadapan dengan kekuatan imperialis Jepang dan nyaris tak pernah luput dari perang saudara. Kondisi perang terus menerus ini membuat konsepsi keamanan nasional dipenuhi beban upaya mempertahankan kesatuan nasional dari ancaman dalam dan luar negeri. Ketiga, menurut Than adalah geografi Myanmar dikelilingi lima Negara dan dua diantaranya adalah Negara etnis, budaya, dan agama walaupun didalamnya terdapat satu etnis dominan, Bamar, yang merupakan 69% dari seluruh penduduk Myanmar.³

Rezim Junta militer yang berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 sering mendapat kecaman dari dunia internasional, hal ini dikarenakan banyaknya kebijakan – kebijakan serta perilaku Junta militer yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta militer seperti:

² *ibid*

³ Cipto, Bambang, “*Hubungan Internasional di Asia Tenggara*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006.

- Tindakan represif Junta militer dalam pada tahun 1988 dimana militer menggilas para demonstrans sehingga menewaskan 3000 orang.
- Pemberontakan etnis Karen, etnis minoritas terbesar kedua setelah Shan, dihadapi dengan brutalisme tanpa ampun yang telah merenggut ribuan jiwa.
- Kasus pemerkosaan yang melibatkan militer terhadap wanita etnis Shan.
- Pada tahun 1992, pembantaian terhadap suku Rohingnya yang merupakan suku minoritas di Myanmar.
- Penahanan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi tanpa proses pengadilan.
- Kekerasan terhadap demonstran yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2007.

Hal – hal seperti inilah yang seringkali membuat Myanmar dijatuhi sanksi dari dunia internasional maupun embargo ekonomi dari berbagai Negara. Akan tetapi sejumlah kalangan menilai sanksi itu tak banyak artinya bagi Junta. Karena Junta militer tidak sedikitpun melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan malah berbalik menyalahkan pihak – pihak yang memberikan sanksi terhadap mereka atas hancurnya perekonomian Myamar.

Semarak adanya kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win kepada pemerintahan U nu pada tahun 1962, militer praktis memegang seluruh aspek yang

ada di Myanmar. Tidak hanya dalam aspek politik Junta militer berkuasa di Myanmar, Junta militer juga mengambil alih penguasaan atas sektor ekonomi. Segala usaha perekonomian di Myanmar dikuasai penuh oleh negara yang dalam hal ini adalah Junta militer. Penguasaan atas akses ekonomi diawali dengan mengambil alih pengelolaan aset – aset kolonial Inggris, seperti perusahaan pelayaran, perkebunan, gedung dan beragam industri lainnya. Pemerintahan Junta melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Rejim junta militer juga memiliki hak tanpa batas untuk mempekerjakan rakyat dengan upah minimum untuk kepentingan bisnis kelompok tersebut.

Kekuasaan Junta militer yang sangat besar terhadap perekonomian Myanmar membuat Junta berhak mengambil keputusan ekonomi tanpa mempedulikan nasib rakyatnya, seperti: mengumumkan bahwa lembaran uang kertas yang bernilai besar tidak lagi berlaku sehingga menghancurkan tabungan masyarakat yang mengakibatkan demonstrasi 1988. Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1988 ini digerakkan oleh mahasiswa dan telah menelan korban hingga 3000 demonstran. Pada tahun 2007 pemerintah Junta militer membuat kebijakan yang sangat berani dengan mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar 500%. Kebijakan tersebut juga memancing kemarahan masyarakat Myanmar yang berdampak pada adanya aksi demonstrasi.

Semula aksi demonstrasi yang dimulai pada Agustus 2007 ini berjalan dengan secara damai. Namun, demonstrasi ini berubah menjadi tragedi berdarah.

Demonstrasi ini diikuti 100.000 orang dan 20.000 orang diantaranya merupakan biksu. Tanggal 26 September 2007 militer memukul, melontarkan gas air mata, dan melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan biksu dan warga sipil di Yangon. Dalam peristiwa ini setidaknya 4 orang yang termasuk 3 biksu tewas dan 100 orang cedera. Sejak Junta bertindak keras kepada demonstran dalam tiga hari terakhir, setidaknya 13 orang tewas dalam peristiwa tersebut termasuk seorang wartawan kantor berita APF News Jepang Kenji Nagai. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadi aksi berdarah seperti yang terjadi pada tahun 1988 yang menewaskan 3.000 demonstran.⁴

Setelah banyaknya kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Junta militer membuat Negara ini juga cenderung menutup diri dari pihak asing. Segala sesuatu yang berasal dari luar Myanmar sangat dibatasi oleh Junta militer. Termasuk membatasi arus informasi dari media asing. Oleh karena itu pada dekade tahun 1989 dan awal 1990 informasi – informasi yang berasal dari Myanmar sangat sulit didapatkan. Hingga saat ini politik Myanmar dikenal dengan politik Isolatif karena kecenderungannya yang tertutup kepada pihak luar.

Istilah Isolatif ini pertama kali digunakan tahun 1860, terkait politik isolasi Amerika. Isolasionisme, tulis *American Heritage Dictionary*, merujuk pada suatu kebijakan nasional yang absen dari hubungan ekonomi maupun politik negara-negara lain. Isolasionisme menegaskan sikap yang tak mau intervensi, baik terhadap militer

⁴ Kompas, "Junta Tembaki Pemrotes", diakses 27 September 2007.

maupun politik mancanegara. Tak mau ikut perang, tak mau kirim serdadu ke negeri asing. Perekonomiannya pun proteksionis, semata-mata perlindungan pada ekonomi domestik alias proteksionis. Karena itu isolasionisme tak mau pusing semua yang terjadi di negara lain dan sebaliknya tidak mau dalam negerinya diganggu atau direcoki oleh pihak luar. Jangan campuri urusan internal negeri lain, urusan domestik cukup serahkan pada pihak masing-masing.⁵

Sungguh unik melihat adanya Negara yang masih bersifat Isolasi pada era globalisasi seperti sekarang ini. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.⁶ Pada era globalisasi seperti sekarang ini Junta militer Myanmar masih tetap mempertahankan politik isolatifnya. Berbagai sikap telah ditunjukkan oleh Junta militer, sejak dipimpin oleh rezim militer Junta melarang adanya arus informasi yang keluar masuk Myanmar. Pemerintah militer pun mempunyai hak untuk melakukan sensor terhadap pemberitaan – pemberitaan yang akan dipublikasikan. Sehingga tingkat aspirasi rakyat dinegara ini pun menjadi rendah.

Aktifitas – aktifitas yang dapat menentukan karakteristik suatu bangsa seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemilihan umum secara teratur dan

⁵ <http://arpohan.wordpress.com/2008/03/02/isolasi/>, 4 November 2008

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses 5 Januari 2009

demokratis, penegakan hukum, hubungan legislatif dan eksekutif yang seimbang. Keseluruhan aktifitas tersebut mempunyai tingkat yang rendah di Myanmar karena kediktatoran pemerintahan militer. Sehingga dikenalnya politik isolatif Myanmar pada era kepemimpinan militer.

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penulisan biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran obyektif terhadap fenomena tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana politik Myanmar dibawah pemerintahan militer.
2. Mengetahui alasan mengapa Myanmar bersifat Isolatif dibawah pemerintahan militer.
3. Mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapatkan selama proses belajar di perkuliahan.
4. Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. POKOK PERMASALAHAN

↳ Mengapa Junta militer tetap mempertahankan politik Isolatif di Myanmar?

E. KERANGKA TEORI

1. Model Aktor Rasional oleh Graham T. Allison

Graham T. Allison memberikan gambaran mengenai proses pembuatan keputusan Model yang digunakan adalah Model Aktor Rasional, Model Politik Birokratik. Dalam kasus ini, penulis akan menggunakan Model Aktor Rasional dalam menjelaskan secara rinci tujuan – tujuan mereka, pilihan – pilihan yang tersedia, dan konsekuensi – konsekuensi yang mungkin akan timbul dari tiap pilihan alternative sebelum membuat keputusan.

Dalam model I, yakni Aktor Rasional, proses pembuatan keputusan dipandang sebagai akibat tindakan – tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monopolitik, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintah dianalogkan dengan perilaku individu yang berbalas dan terkoordinasi. Setiap individu melalui beberapa tahap intelektual untuk menerapkan dan menetapkan pilihan atas alternative – alternative yang ada. Maka, unit analisis dalam pembuatan keputusan ini adalah pilihan – pilhan yang diambil oleh pemerintah.⁷

⁷ Machtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta LP3ES, 1990. Hal. 234

Para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif – alternatif ini menggunakan criteria “Optimalisasi Hasil”. Para pembuat keputusan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaanya melalui beberapa informasi yang diperolehnya dan beberapa sumber yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.⁸

Dengan demikian, maka para pembuat keputusan tersebut mampu menggunakan rasionalitasnya untuk pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil cenderung menyangkut keputusan luar negeri yang dibuat secara rasional. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, maka pembuat keputusan harus mengetahui tujuan dalam melakukan tindakan ini.

Untuk menentukan politik luar negeri, dalam mempelajari proses pembuatan keputusan politik luar negeri, harus diketahui siapa yang ikut bermain, yang mempengaruhi berbagai persepsi pembuatan keputusan, dan bagaimana cara mengagregasikan kepentingan tersebut sehingga menghasilkan suatu keputusan pemerintah yang baik. Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasional dan kita umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan dibuat secara rasional. Karena itulah model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Kebijakan yang diambil atau politik luar yang dilaksanakan merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan – tujuan strategis dari bangsa tersebut.

⁸ *ibid*

Sebagai aplikasi pada penulisan skripsi ini, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan teori Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional, Model Aktor Rasional dapat menjelaskan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan karakteristik politik Myanmar bersifat Isolatif. Sejak terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Myanmar pada saat itu yaitu Jenderal Ne Win terhadap Perdana Menteri U Nu. Sejak saat itu militer menjadi satu aktor utama yang menjalankan sistem pemerintahan di Myanmar.

Dalam ilmu ketatanegaraan, seharusnya militer ini berkedudukan sebagai alat dari birokrat untuk memaksakan peraturan agar dipatuhi oleh rakyatnya serta bertugas melindungi keamanan negara tersebut dari negara lain. Tetapi di Myanmar posisi birokrasi sebagai alat kapitalis dalam melindungi kepentingan bisnisnya ternyata dirangkap juga oleh militer. Sehingga dalam hal ini militer sebagai aktor yang otoriter dapat mempergunakan kekuatan senjatanya yang tanpa batas untuk pengaturan dan pengawasan rakyatnya guna melindungi kepentingan para kapitalis ini, juga memaksakan kehendaknya untuk mematikan pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah, dan mampu pula dengan senjata memaksa buruh bekerja semaksimal mungkin dengan upah seminimal mungkin.⁹

Sejak tahun 1962 militer menjadi penguasa mutlak di Myanmar hampir semua sektor yang ada di Negara itu, hampir seluruh kebijakan yang dibuat hanya untuk mengedepankan kepentingan militer saja. Pemerintahan Myanmar juga bersifat kedap

⁹ <http://maspungky.multiply.com/journal/item/198>, diakses 20 Januari 2009

yang artinya pemerintah Junta militer tidak peduli dengan aspirasi masyarakatnya apabila masyarakatnya merasa keberatan dengan kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahnya. Pemerintah Junta militer bahkan cenderung memaksakan kebijakannya dengan melakukan tindakan – tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang memberikan perlawanan. Pemerintah militer Myanmar juga tidak mendengarkan kecaman – kecaman yang datang dari dunia internasional.

Oleh karena itu berdasarkan Model Aktor Rasional dapat dianalisa faktor yang menyebabkan politik Isolatif Myanmar dibawah kekuasaan militer yaitu karena adanya kekhawatiran Junta militer akan goyahnya kekuasaan mereka di pemerintahan Myanmar. Pengaruh – pengaruh yang berasal dari luar sebisa mungkin diblokir oleh Junta militer terutama pengaruh – pengaruh yang membuat perubahan bagi sistem politik di Myanmar. Sekarang ini rakyat Myanmar sudah mulai jenuh terhadap pemerintahan militer yang dianggap telah menyengsarakan mereka. Masyarakat Myanmar menginginkan perubahan – perubahan kearah demokrasi. Hal ini sebenarnya sudah tampak sejak tahun 1990 ketika pemilu dimenangkan oleh partai *National League for Democracy* pimpinan Aung San Suu Kyi, serta kalahnya *National Unity Party* yang merupakan wakil dari Junta militer.

Akan tetapi hingga saat ini belum ada peralihan kekuasaan kepada partai yang memenangkan pemilu. Pemerintah militer malah melakukan penekanan terhadap anggota NLD serta siapa saja yang bersifat pro demokrasi. Karena apabila masuknya sistem demokrasi ke Myanmar maka kekuasaan militer pun akan hancur, terlihat

dengan bagaimana pemilu yang merupakan bagian dari demokrasi dimenangkan oleh partai di luar militer.

Negara yang mempunyai sifat politik yang Isolatif juga cenderung melakukan proteksionisme ekonomi. Hal tersebut juga terjadi pada Myanmar, adanya kekuasaan militer yang sangat besar pada perekonomian Myanmar membuat sifat proteksionis terhadap ekonomi ditunjukkan oleh Junta militer. Proteksionisme ekonomi merupakan sistem untuk melindungi perekonomian atau produsen domestik dari intervensi asing. Junta militer melakukan proteksionisme ekonomi yaitu untuk melindungi kekuasaannya pada bidang ekonomi. Dengan tidak membiarkan adanya intervensi asing kedalam perekonomian yang dikasai oleh Junta militer.

Pada masa awal pemerintahan Junta militer mengapus sistem kapitalisme dan menggantikannya dengan sistem sosialisme. Kepentingan Junta militer dalam perekonomian Myanmar sangat besar oleh karena itu mereka cenderung menutup dari dunia internasional untuk menekan pengaruh – pengaruh asing yang dapat dibawa oleh orang – orang yang masuk ke Negara mereka. Pengaruh tersebut seperti dapat munculnya cikal bakal kapitalisme yang akan menghancurkan kekuasaan ekonomi di Myanmar.

Kekuasaan Junta militer yang sangat kuat dalam sistem ekonomi Myanmar tentu saja tidak sesuai dengan konsep kapitalisme dimana pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar. Hal ini tentu akan menggoyahkan kekuasaan Junta militer karena pasar yang akan menjadi penentu. Masuknya sistem kapitalisme pada

suatu Negara akan mengubah sistem sosial yang telah melekat pada Negara tersebut, dan resiko atas masuknya kapitalisme salah satunya yaitu system demokrasi.

Sifat Isolatif Myanmar tidak serta merta membuat Myanmar sangat tertutup dengan Negara lain. Negara yang dinilai mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Myanmar adalah Cina. Cina merupakan Negara yang berbatasan langsung Myanmar. Cina senantiasa mendukung eksistensi Junta militer Myanmar dengan bantuan – bantuan yang bersifat potensial bagi Junta militer Myanmar. Perusahaan – perusahaan Cina pun diberikan izin oleh pemerintah militer untuk melakukan eksplorasi di Myanmar. Dengan bekerjasama dengan Cina, militer Myanmar mendapatkan keuntungan – keuntungan seperti dukungan untuk mempertahankan kekuasaanya di Myanmar serta memperkuat pertahanan militer.

2. Teori Persepsi

Dalam pengertian bebas, persepsi diartikan sebagai cara pandang seseorang memandang orang lain yang didasarkan oleh pengetahuan dan informasi serta fakta – fakta yang dimiliki seseorang. Persepsi diberikan pada tempat yang penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan persepsi memandu untuk bertindak tanpa menghiraukan apakah persepsi itu benar atau salah, tindakan – tindakan yang kita ambil berdasarkan pada persepsi kita.

Terdapat tiga komponen dalam persepsi, yakni nilai, keyakinan dan pengetahuan. Nilai, merupakan preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibandingkan realitas lainnya. Keyakinan dalam deskripsi realitas adalah benar

terbukti. Dan pengetahuan adalah bersumber dari data atau informasi yang diterima lingkungan. Bagi para teoritis perceptual, bahwa pengetahuan mengandung komponen subyektif dan obyektif. Fakta tidak berbicara sendiri tapi diberi arti oleh setiap penafsir sesuai dengan titik pandang analitisnya sendiri. Kesimpulan mengenai fakta tergantung pada penafsiran terhadap fakta tersebut. Lebih jauh lagi, fakta tidak muncul dari realitas melainkan dari keeping informasi tertentu atas realitas yang diseleksi oleh seorang pengamat sesuai dengan kepentingannya sedang keeping informasi lainnya ditolak karena tidak sesuai dengan kepentingannya.¹⁰

Dalam penerapan teori perspektif pada skripsi ini yaitu bagaimana perspektif Junta militer Myanmar tentang politik Isolatif. Dalam hal ini dimana perspektif militer Myanmar yang memandang bahwa politik isolatif tersebut dapat berpengaruh pada stabilitas nasional serta perekonomian Myanmar. Dalam pandangan militer Myanmar politik Isolatif akan dapat menjaga stabilitas nasional sehingga masyarakatnya tidak adanya pengaruh asing yang akan merusak tatanan politik di Myanmar, yang akan menggoyahkan kekuasaan militer.

F. HIPOTESIS

Junta militer Myanmar bersifat Isolatif karena:

1. Kekhawatiran Junta militer terhadap pengaruh asing yang dapat menggoyahkan kekuasaannya.
2. Untuk mempertahankan dominasi Junta militer di Myanmar.

¹⁰ Waters S. Jones, *Logika HI: Persepsi Nasional I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 276.

3. Ada dukungan terhadap eksistensi Junta militer dalam pemerintahan Myamar.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data – data empiris yang ada. Penulisan ini bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti surat kabar, majalah dan tabloid. Penggunaan situs – situs internet sebagai sumber data yang dapat menunjang penulisan skripsi ini

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk membatasi masalah yang dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai **Kepentingan Militer dibalik Politik Isolatif Myanmar** ini dibatasi dengan menggunakan jangkauan waktu yakni sejak tahun 1962 hingga tahun 2008. Namun dibebberapa bagian penulisan ini tidak tertutup kemungkinan untuk mengulas berbagai peristiwa pada tahun – tahun sebelumnya untuk kepentingan penelitian. Tahun 1962 merupakan tahun dimana adanya kudeta serta peralihan kekuasaan kepada militer. Sedangkan tahun 2008 merupakan tahun dimana pemerintah Junta militer melalui SPDC telah mengumumkan rencana pelaksanaan pemilu pada tahun 2010.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini adalah akan terbagi kedalam lima bab hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini mendeskripsikan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Dinamika Pemerintahan Militer Myanmar

Pada awal bab kedua menerangkan tentang gambaran umum dari Negara Myanmar dan seperti apakah junta militer tersebut. Setelah itu membahas latar belakang masuknya militer kedalam pemerintahan Myanmar serta membahas bagaimana pemerintahan Myanmar dari model Sosialisme Gaya Burma, SLORC dan SPDC dan bagaimanan kebijakan – kebijakan Junta militer. Bab ini juga membahas berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta militer.

BAB III: Politik dan Kekuasaan Junta Militer

Dalam Bab ketiga ini menjelaskan tentang bagaimana politik Isolatif Myanmar dibawah Junta militer dan tututan demokrasi di Myanmar. Bab ini juga membahas bentuk kekuasaan Junta militer terhadap perekonomian Myanmar serta reaksi dunia internasional terhadap pemerintahan Junta militer Myanmar.

BAB IV: Faktor – Faktor Penyebab Politik Isolatif Myanmar dibawah Pemerintahan Militer

Bab ini akan menjelaskan faktor – faktor yang menyebabkan adanya politik Isolatif Myanmar dibawah kekuasaan militer.

BAB V: Kesimpulan

Dalam bab terakhir berisi rangkuman atau kesimpulan yang merupakan intisari dari bab – bab sebelumnya, yang telah menjawab pokok permasalahan yang telah diangkat penulis dalam skripsi ini.

BAB II

DINAMIKA PEMERINTAHAN MILITER MYANMAR

Myanmar terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan Cina disebelah utara, Teluk Benggala di sebelah selatan dan terletak diantara Bangladesh dan Thailand. Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Burma) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa.¹¹ Myanmar terdiri dari beberapa etnis besar yang tersebar diseluruh wilayahnya, etnis Burma yang merupakan etnis terbesar sekitar 68% dari total penduduk Myanmar dan sekitar 80% penduduk Myanmar beragama Buddha. Awal mulanya Ibukota Myanmar adalah Yangoon akan tetapi dibawah kekuasaan Junta militer ibukota Myanmar dipindahkan ke Naypidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar sendiri juga merupakan anggota dari Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) sejak 23 Juli 1997.

Penduduk Myanmar telah ada sekitar 3000 tahun SM, mereka adalah penduduk yang bermukim disepanjang Teluk Benggala. Myanmar dulu adalah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagan yang dipimpin oleh Raja Anawrahta (1044-1077). Raja Anawrahta menguasai hampir seluruh wilayah Burma. Namun kerajaan Pagan yang berkuasa sejak 1044-1287, diserbu oleh Tiongkok dipimpin oleh *Ku*

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>, diakses 5 Oktober 2008

Bhilai Khan dan menghancurkan kerajaan Pagan pada tahun 1287. Burma akhirnya terpecah kedalam kerajaan-kerajaan kecil kembali. Salah satu kerajaan, yakni *Kerajaan Toungoo*, muncul dan kembali menguasai seluruh Burma, bahkan pernah menguasai Siam (Thailand). Namun perlawanan dan pemberontakan bangsa Siam telah menghabiskan seluruh energi Kerajaan Toungoo hingga akhirnya Toungoo tenggelam setelah berkuasa sejak tahun 1280-1600 dan Siam kembali merdeka. Muncullah kemudian *Kerajaan Burma* yang berkuasa sejak tahun 1753-1886. Adalah Raja *Alaungpaya*, peletak kerajaan dan kejayaan Burma. Ia bahkan pernah melakukan ekspansi sampai ke daerah teritori India dan Siam sehingga menimbulkan Perang melawan Inggris selama 3 periode.¹² Myanmar jatuh ke tangan Inggris pada sekitar tahun 1885 hingga akhirnya diberikan kemerdekaan pada tahun 1948. Pada masa awal kemerdekaannya Myanmar adalah Negara dengan sistem Parleментар.

Bendera Kebangsaan Myanmar adalah bendera berwarna merah, di ujung atas sebelah kiri sebuah segi empat panjang kecil yang berwarna biru hitam, di dalamnya dilukiskan gambar yang berwarna putih?14 bintang bersegi lima mengitari sebuah roda gigi dengan 14 gigi, di tengah roda gigi terdapat sebatang padi. Warna merah melambangkan keberanian dan ketegasan, biru tua melambangkan perdamaian dan kesatuan, warna putih melambangkan kemurnian dan kebajikan. 14 bintang bersegi

¹² <http://negara-yoppy.blogspot.com/2007/10/gerakan-demokrasi-myanmar-kegagalan.html>, diakses 2 Januari 2009

lima mewakili 14 provinsi atau negeri bagian Uni Myanmar, roda gigi dan padi melambungkan industri dan pertanian.

Lambang Negara yaitu titik pusat sebagai sebuah roda gigi dengan 14 gigi dilingkari oleh padi, di atasnya dilukiskan peta Myanmar. Di dua sebelah padi masing-masing terdapat seekor singa, singa dijunjung sebagai hewan kenegaraan, disebut sebagai singa suci yang merupakan pertanda kemujuran. Di sisi atas tampak sebuah bintang bersegi lima, di dua sebelahnya dan di sekitar padi dihiasi bunga-bunga Myanmar, pita hiasan di sisi bawah dituliskan " Uni Myanmar " dalam bahasa Myanmar.¹³

Myanmar Pada tanggal 18 Juni 1989 Junta militer merubah nama Burma menjadi Myanmar. Selain itu pemerintah junta juga mengubah nama Rangoon menjadi Yangon. Pada 2005, pemerintah membangun ibu kota baru, bernama Naypyidaw untuk menggantikan ibukota Myanmar yang sebelumnya yaitu Yangon.

A. JUNTA MILITER

Junta sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti "*Komite*" atau "*Dewan Pimpinan*". Junta selalu mengacu kepada kepemimpinan bersama dari beberapa orang dan biasanya mewakili dari institusi tertentu. Biasanya '*Junta Militer*' hadir dalam proses politik melalui kudeta politik kekuasaan yang dilakukan oleh militer. Pemerintahan "*Junta Militer*" selalu ditandai dengan penggunaan kekerasan

¹³ <http://indonesian.cri.cn/1/2006/09/12/1@49879.htm>, diakses 5 November 2008

dalam wilayah politik. Pengalaman '*Junta Militer*' di manapun selalu memanfaatkan dan memproduksi '*state of exception*'. Dengan berbagai cara masyarakat dipaksa untuk menerima kondisi hidup dalam situasi darurat. Hanya dengan demikian maka kehadiran pemerintahan militer dapat diterima. Kebanyakan kasus di beberapa Negara, pemerintahan dengan sistem '*Junta*' ketika dikuasai oleh militer beralih menjadi satu kekuasaan yang sangat kental dengan kediktatoran.¹⁴

Pada masa awal sejarah kepemimpinan Junta militer terkenal di negara – Negara Amerika Latin seperti di Argentina dan Chili. Pemerintahan Junta militer dipimpin oleh seorang Jenderal yang juga pangkat tertinggi dalam militer. Keberadaan Junta militer di beberapa Negara dikarenakan adanya kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan sipil. Adanya kudeta yang dilakukan oleh militer dapat dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan sipil atau adanya keinginan militer untuk masuk dan menguasai pemerintahan serta didukung kuatnya persenjataan yang dimiliki militer sehingga mereka dapat melakukan tekanan – tekanan terhadap siapa saja.

Junta militer sangat dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang dictator, beberapa Negara yang mengalami masa kepemimpinan junta militer tercatat pernah mengalami tekanan. Banyak tindakan yang telah dilakukan oleh Junta militer yang merugikan bahkan memakan banyak korban jiwa. Seperti yang dialami oleh

¹⁴ http://www.jurnalbenangmerah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=2, 12 Februari 2009

Argentina pada tahun 1976 – 1983, ketika dipimpin oleh Jenderal Jorge Rafael Videla. Dalam masa pemerintahan Junta militer, rakyat Argentina berada dalam penderitaan dan kemiskinan hal tersebut karena Argentina mengalami krisis ekonomi berkepanjangan akibat kepemimpinan Junta militer. Sama seperti apa yang sekarang dialami oleh rakyat Myanmar yang selalu mendapatkan tekanan dari rezim militer.

Selain Argentina masih banyak Negara lain yang pernah dipimpin oleh Junta militer seperti: Gambia, Sudan, Liberia, Somalia, Chile, Kuba. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak Negara yang dipimpin oleh Junta militer seperti: Fiji, Guinea, Libya, Mauritania dan yang paling sering menjadi sorotan yaitu Junta militer yang sedang menguasai Myanmar. Junta militer mulai menguasai Myanmar pada tahun 1962, ketika adanya kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win terhadap pemerintahan U Nu.

B. LATAR BELAKANG PEMERINTAHAN MILITER MYANMAR

Militer Myanmar dikenal secara resmi dengan nama Tatmadaw, Tatmadaw terdiri dari angkatan Darat, Laut dan Udara. Militer merupakan sebuah administrasi yang dikontrol oleh Departemen Pertahanan. Sosialisasi golongan militer Myanmar adalah sama dengan sosiologi kebanyakan masyarakat agraris dalam arti bahwa para anggota pasukan direkrut dari penduduk desa yang setengah menganggur, sedang para bintaranya diambil dari pasukan yang dapat menyesuaikan diri dengan disiplin

kehidupan militer (kebanyakan anggota pasukan mengundurkan diri sesudah berdinasi selama tiga atau lima tahun), sedangkan para perwira kebanyakan adalah lulusan perguruan tinggi, baik dari akademi militer atau Universitas Training Corps. Program pendidikan militer Myanmar adalah profesional dan mutu kebanyakan prajurit memadai untuk tugas yang diemban, jika tugas tersebut terbatas pada mempertahankan monopoli untuk menggunakan kekerasan dan bukan penyelesaian beratus – ratus tugas lainnya.¹⁵ Berikut adalah nama – nama pemimpin Tatmadaw:

1. Major General Aung San Major General Let Yar
2. Lt General Smith Dunn
3. General Ne Win
4. General San Yu
5. General Thura Tin Oo
6. General Thura Kyaw Htin
7. Sr General Saw Maung
8. Sr General Than Shwe (1992 - sekarang)

Dalam berbagai studi, peranan militer sangat dominan dalam membentuk kehidupan politik otoriter. Setidaknya ada beberapa alasan militer selalu berkehendak untuk tampil dalam kehidupan politik, yakni (1). Kehendak terlibat dalam menguasai aset – aset ekonomi dan bisnis. Dibanyak Negara yang pernah dikuasai oleh rejim

¹⁵ Myan Than & Joseph L.H. Tan, *Transisi Ekonomi 1990-an Tantangan dan Dilema Myanmar*, LEDES, 1993, hal 288.

militer, aset-aset ekonomi justru tersentralisasi ditangan Junta dan kilik pengusaha sekelilingnya. Terbukti bahwa rejim militer bias merupakan rejim paling anti demokrasi dan paling korup, karena sangat agresif dalam mengakumulasi tetapi tidak terlibat dalam produksi ekonomi. (2). Kegagalan politik sipil dalam mengembangkan kepemimpinan politik yang kuat dan stabil. Bagi pandangan politik militer, demokrasi bisa dikatakan berbahaya karena terlalu memberi ruang pergesekan dan merugikan rakyat. (3). Doktrin militer yang masih belum menghargai supermasi sipil. Ditarik dalam konterks Myamar, sepertinya militer Myanmar adalah kekuatan politik yang selalu mendominasi dalam proses ekonomi dinegara tersebut.¹⁶

Masuknya militer kedalam system politik Myanmar tidak lepas dari adanya perpecahan kelompok yang berkuasa di Myanmar pada masa lalu. Pada saat itu Myanmar dikuasai oleh *Anti Fasci People's Freedom League* (AFPFL). Organisasi ini didirikan pada bulan Agustus 1944 oleh kaum nasionalis anti Jepang yang dipimpin oleh Aung San yang merupakan ayah dari tokoh oposisi Aung San Suu Kyi. Akan tetapi pada bulan Juli 1947 Aung San ditembak mati oleh lawan politiknya yaitu U Saw dan posisinya digantikan oleh wakil AFPFL pada saat itu yaitu U Nu. Pada saat bersamaan terjadi pergantiaan kepemimpinan di kubu militer yang kemudian dipimpin oleh Jenderal Ne Win.

¹⁶ <http://lmnd.wordpress.com/2007/09/30/adakah-peluang-kemenangan-demokrasi-di-myanmar/>, diakses 12 Januari 2008

Pada saat AFPFL menguasai perpolitikan di Myanmar seperti terlihat kondisi perpolitikan yang kondusif di Myanmar dengan perkembangan demokrasi parlementer yang sehat. Akan tetapi dibalik semua itu terdapat banyaknya golongan yang melakukan perlawanan terhadap AFPFL. Seperti golongan komunis yang sebagian besar berjuang demi komunisme internasional bukan kepentingan nasional. Perlawanan juga berasal dari orang – orang komunis yang telah dikeluarkan Aung San dari AFPFL beberapa saat sebelum kematiannya.

Dalam tahun 1949 kelompok sosialis didalan AFPFL bertengkar sengit dengan U Nu. Walaupun pertengkar itu tidak menimbulkan perpecahan organisasi, namun mempunyai pengaruh tidak baik dalam hubungan selanjutnya antara U Nu dan tokoh Sosialis dikemudian hari. Pada tahun 1950 sekelompok kecil pasukan yang dianggap pro Rusia dikeluarkan dari AFPFL, antara lain karena keberanian mereka mengkritik politik luar negeri pemerintah dalam soal perang Korea.¹⁷

Pada saat itu kondisi di Myanmar tidaklah kondusif, hal itu dikarenakan oleh banyaknya pemberontakan – pemberontakan yang dilakukan oleh etnis – etnis minoritas seperti etnis Shan dan etnis Karen. Posisi U nu semakin terjepit dengan adanya korupsi yang ada di pemerintahan. Setelah Myanmar mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1948 tidak membuat padamnya pemberontakan – pemberontakan oleh etnis minoritas. Hal tersebut membuat pemerintah harus selalu mengawasi setiap pemberontakan yang ada. Oleh karena itulah militer sangat

¹⁷ Alfian, Tingkah Laku Politik Di Asia Tenggara, hal. 11.

berperan besar dalam mengawasi pemberontakan yang membuat posisi militer semakin kuat. Setelah itu banyak anggota militer yang menjadi politikus dan mulai mencampuri urusan Negara.

Militer menjadi satu – satunya organisasi yang kuat dibanding organisasi lainnya. Hal ini menyebabkan posisi militer semakin dominan didalam pemerintahan karena memiliki disiplin yang tinggi. Faktor tersebut membuat adanya “transfer konstitusional kekuasaan” oleh militer dibawah Jenderal Ne Win pada tahun 1958 dengan janji melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan jujur.

Akan tetapi pada tahun 1962, suatu kelompok perwira angkatan udara yang dipimpin oleh Jenderal Ne win menggulingkan pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh U Nu. Sejak saat itu Myanmar berada dibawah kekuasaan militer yang menyebabkan banyaknya perwira tinggi yang menduduki jabatan yang ada di pemerintahan. Peralihan kekuasaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbaikan kondisi keamanan di Myanmar, pemberontakan – pemberontakan malah semakin banyak apalagi yang sifatnya melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Myanmar.

Hingga saat ini pemerintahan Myanmar masih dikuasai oleh rezim militer yang diktator. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh militer hanya untuk kepentingan mereka saja. Pemerintahan militer tidak memikirkan bahkan tidak memperdulikan aspirasi rakyatnya. Militer mempunyai kekuatan untuk memaksakan

kehendak mereka terhadap masyarakat Myanmar karena mempunyai kekuatan perserajaan. Hancurnya perekonomian Myanmar yang membuat Negara ini menjadi salah satu Negara miskin didunia. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan militer yang menjadi prioritas utama, sehingga banyaknya anggaran Negara yang dikeluarkan untuk kepentingan militer serta menguras anggaran untuk kesejahteraan rakyat Myanmar sendiri.

Pemerintah Myanmar mengalokasikan 40% anggarannya untuk militer yang hanya berjumlah 450.000 personil. Sedangkan jumlah penduduk Myanmar sekitar 56 juta jiwa. Militer mendapatkan alokasi keuangan sekitar 120 kyat (mata uang Myanmar) sedangkan rakyat hanya menerima 1 kyat. Dengan perbandingan ini sekitar 90% rakyat Myanmar hidup dalam kemiskinan.¹⁸

C. PEMERINTAHAN MILITER MYANMAR

Sejak militer menguasai Myanmar pada tahun tahun 1962 nama pemerintah Myanmar telah berganti sebanyak tiga kali. Pergantian nama tersebut seringkali diiringi dengan adanya pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan. Akan tetapi pergantian nama pemerintahan tidak membuat perubahan ke arah yang lebih baik bagi rakyat Myanmar. Akan tetapi dianggap hanya sebagai pergantian kulit dan pemerintahan militer.

¹⁸ <https://www.opensubscriber.com/message/zamanku@yahoogroups.com/7738490.html>, diakses 27 Januari 2008.

1. Sosialisme Gaya Burma

Sosialisme Gaya Burma telah diterapkan Jenderal Ne Win di Myanmar sejak melakukan kudeta terhadap U Nu pada tahun 1962. Sosialisme Gaya Burma ini ditandai dengan adanya nasionalisasi terhadap perusahaan – perusahaan asing untuk dikuasai oleh militer. Pemerintahan dengan menerapkan sistem Sosialisme Gaya Burma ini juga menghapuskan sistem Parlemen yang ada pada saat Pemerintahan U Nu dan Partai Sosialisme Program Burma merupakan satu – satunya partai yang ada. Mayoritas dari anggota partai tersebut adalah anggota militer sendiri.

Para era Sosialisme Gaya Burma ini semua unsur kabinet maupun kepala perusahaan dipegang oleh anggota militer yang memperoleh kepercayaan dari Jenderal Ne Win. Hal tersebut dapat dipahami karena pada saat berkuasa di pemerintahan, U Nu juga menunjuk orang – orang kepercayaannya. Akan tetapi ada perbedaan antara penunjuk yang dilakukan oleh Ne Win dan U Nu. U Nu menunjuk orang – orang yang masuk dalam pemerintahannya berdasarkan pengalaman administratif yang dimiliki anggotanya. Sedangkan personel militer praktis tidak mempunyai pengalaman.

2. Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara atau *State Law and Order Restoration Council* (SLORC).

Pada tahun 1988 Ne Win lengser dari jabatannya karena adanya kuota oleh Menteri Pertahanan saat itu Jenderal Saw Maung. Turunnya Ne Win dari jabatannya juga di tandai dengan runtuhnya Partai Sosialis Burma. Pada era kekuasaannya Saw Maung mendirikan *State Law and Order Restoration Council* atau SLORC. Akan tetapi perubahan kekuasaan di Myanmar pada saat itu tidak mengubah kondisi rakyat Myanmar pada hal yang lebih baik. Hal ini dikarenakan mayoritas anggota SLORC adalah kader – kader militer yang telah dididik oleh Ne Win. Pada masa pemerintahan Ne Win inilah pemerintahan Myanmar dikenal sebagai pemerintah Junta militer, karena merupakan sebuah pemerintahan yang sangat mengandalkan militer.

Ketika Myanmar dikuasai oleh Saw Maung pada saat itu pemerintah memberi kesempatan kepada partai politik untuk berkembang sehingga tidak ada lagi sistem partai politik tunggal seperti pada era pemerintahan Ne Win. Untuk pertama kalinya Myanmar mengadakan pemilihan umum pada tanggal 27 Mei 1990. Pemilu tersebut juga diikuti oleh Partai Sosialis Progran Burma yang telah berganti nama menjadi *National Unity Party* sebagai wakil Junta militer yang didirikan pada tanggal 26 September 1988. Sedangkan tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi mengikuti pemilu bersama partainya yaitu *National League for Democracy* (NLD).

Pemilu pertama yang dilaksanakan di Myanmar ini diikuti oleh sejumlah partai lain. Umumnya partai – partai yang mengikuti pemilu ini mewakili berbagai

suku minoritas di Myanmar. Seperti suku Arakan yang diwakili partai *Arakan League for Democracy*, suku Shan yang diwakili oleh *Shan National League for Democracy* dan suku Chin yang diwakili oleh *Chin National League for Democracy*. Namun, pemilu ini dimenangkan oleh NLD dengan perolehan kursi 392 dari 492 kursi yang disediakan. Sedangkan *National Unity Party* hanya memperoleh 10 kursi di parlemen.¹⁹

Pemilu yang dilaksanakan oleh Myanmar pada tahun 1990 seakan tidak memberikan berpengaruh terhadap perubahan perpolitikan di Myanmar. Hal ini dikarenakan tidak adanya peralihan kekuasaan kepada NLD selaku partai pemenang pemilu. Pada saat itu pemerintah militer Myanmar beralasan untuk tidak langsung melakukan pemindahan kekuasaan dikarenakan dewan SLORC belum menyusun konstitusi baru. Akan tetapi hingga saat ini pemerintah Junta militer masih tetap memegang kekuasaan di Myanmar. Sedangkan ketua NLD Aung San Suu Kyi dijadikan tahanan dengan alasan yang kurang jelas, pemerintahan militer beranggapan bahwa Aung San Suu Kyi dapat membahayakan eksistensi mereka di pemerintahan dengan banyaknya dukungan dari rakyat Myanmar yang mendukung Aung San Suu Kyi.

Pada tanggal 18 Juni 1989 Junta militer merubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Karena nama Burma dianggap hanya mewakili suku mayoritas yang ada di Myanmar yaitu suku

¹⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Burma, diakses 8 November 2005

Burma. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional. Beberapa negara di Eropa seperti Inggris dan Irlandia yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan "Burma" untuk merujuk kepada negara tersebut. Sedangkan Negara di Eropa yang mengakui perubahan nama Myanmar yaitu Perancis dan Jerman. Akan tetapi PBB sendiri mengakui nama Negara tersebut dengan sebutan Myanmar.

3. Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara *State Peace and Development Council* (SPDC).

Setelah era pemerintahan Saw Maung mengundurkan diri pada tahun 1993 kemudian digantikan oleh Jenderal Than Shwe. Dibawah kepemimpinan Than Shwe pemerintahan Junta militer mengganti nama dari SLORC menjadi *State Peace and Development Council* (SPDC) yang bertahan hingga sekarang. Pemerintahan Myanmar dibawah control SPDC ini merupakan sebuah pemerintahan terpusat dimana SPDC merupakan pusat dari pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya Jenderal Than Shwe dibantu oleh seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan 18 orang anggotanya. Karena semua dikendalikan oleh SPDC jadi dapat dikatakan bahwa kabinet hanyalah pelaksana saja dari semua kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh SPDC. SPDC telah berkali – kali telah merombak kabinetnya, perombakan besar pertama kabinet Myanmar terjadi pada 15 November 1997, ketika 20 menteri diganti.

Pada tahun 2005 pemerintah Junta militer juga membuat kejutan dengan memindahkan ibukota Myanmar yang semula terletak di Yangon kemudian menjadi di Naypidaw. Hal tersebut dilakukan secara diam – diam tidak hanya dari dunia internasional tetapi juga dari masyarakat sendiri. Tidak banyak masyarakat Myanmar yang mengetahui hal itu karena tidak ada pemberitahuan oleh pemerintah sebelumnya. Dunia internasional pun tidak diperbolehkan untuk mengambil foto dari lokasi ibukota Myanmar yang baru itu. Keputusan Junta militer tersebut mengundang banyak tanya. Naypidaw bukanlah tempat yang strategis untuk dijadikan pusat pemerintahan, karena lokasinya yang berada di belakang hutan belantara. Kepindahan tersebut diduga bentuk dari sifat Isolasi yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah Myanmar.

Myanmar sempat terkena bencana alam yaitu badai Nargis yang sempat meporak - porandakan pada awal Mei tahun 2008. Bencana tersebut banyak menimbulkan korban jiwa serta semakin menambah penderitaan rakyat Myanmar. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurungkan niat SPDC untuk melaksanakan referendum. Oleh karena itu ditengah kondisi yang belum kondusif pasca badai Nargis, pada tanggal 10 Mei 2008.

UUD yang membutuhkan dukungan rakyat melalui referendum adalah langkah penting bagi junta militer untuk meligitimasi kekuasaan. Militer mendapat 25 persen kursi di parlemen dan wewenang lebih luas lagi. 10 Mei lalu, ketika referendum

digelar di bagian lain Myanmar, tidak ada pengamat independen. Di mana-mana terdengar desas-desus mengenai kecurangan dan intimidasi. Menurut pihak berwenang Myanmar, 99 persen menggunakan hak pilih dan 92,4 persen elektorat mendukung UUD baru. Jelas sudah bahwa hasil bagian kedua referendum ini bisa ditebak sebelumnya.²⁰

Pada tahun 2008 pemerintahan Junta militer melalui SPDC pada bulan Februari 2008 mengumumkan akan mengadakan pemilu pada tahun 2010. Pengumuman dari pemerintah tersebut menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan dengan sistem multipartai.

C. PELANGGARAN HAM OLEH MILITER MYANMAR

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusi yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan arena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita – citanya.²¹

²⁰ http://www.ranesi.nl/spesial/myanmar_pasca_nargis080521/

²¹ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, PT Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 50.

Selama masa memerintah Myanmar sejak tahun 1962, Junta militer telah banyak melakukan pelanggaran – pelanggaran HAM. Hingga saat ini Myanmar dikenal sebagai Negara yang mempunyai tingkat pelanggaran HAM yang tinggi. Sejumlah etnis minoritas yang merasa diperlakukan tidak adil menimbulkan banyaknya pemberontakan – pemberontakan di negeri Seribu Pagoda tersebut. Kehidupan politik di Myanmar yang jauh dari demokrasi membuat masyarakatnya kesulitan dalam menyampaikan aspirasi – aspirasinya. Sehingga menyebabkan terjadinya demonstrasi besar – besar yang memaksa Junta militer untuk bersikap represif. Adapun jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Myanmar antara lain:

1. Pelanggaran HAM Terhadap Suku – suku Minoritas

Myanmar mempunyai berbagai macam etnis, etnis Burma merupakan etnis mayoritas di Myanmar dengan jumlah populasi sekitar 68% dari penduduk Myanmar. Akan tetapi disamping etnis Burma terdapat etnis – etnis minoritas yang menduduki Negara yang dikenal dengan Negara seribu pagoda ini. Etnis – etnis minoritas tersebut seperti etnis Karen, Shan, Chin, Mon dan Rohingya.

Etnis Karen merupakan etnis yang menetap di daerah pedesaan sepanjang perbatasan Myanmar dan Thailand. Etnis Shan menetap di dataran tinggi Shan. Etnis Mon menempati daerah disepanjang pantai Tennasserim. Etnis Chin bertempat tinggal di sepanjang perbatasan antara Myanmar dan India. Sedangkan etnis

Rohingya adalah grup etnis yang kebanyakan beragama Islam di Negara Bagian Rakhine Utara di Myanmar Barat. Populasi Rohingya terkonsentrasi di dua kota utara Negara Bagian Rakhine (sebelumnya disebut Arakan).²²

Adanya perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar oleh pemerintahan Junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Mempunyai tujuan untuk menyatukan etnis – etnis non Burma. Karena nama Burma dinilai hanya dapat mewakili etnis minoritas saja yaitu etnis Burma. Akan tetapi perubahan nama tersebut tidak dapat mengakhiri pemberontakan – pemberontakan yang dilakukan oleh etnis – etnis minoritas yang ada di Myanmar. Pemberontakan – pemberontakan tersebut terus saja berlanjut hingga mendapat tekanan – tekanan dari Junta militer yang mayoritas anggotanya adalah suku Burma.

Beberapa etnik minoritas sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan dari Myanmar, saat ini terpaksa menerima konsep Myanmar Bersatu (*Union of Myanmar*). Bukan karena kompensasi ekonomi-politik, tapi karena tak tahan menerima sikap represif rejim militer. Rohingya tidak termasuk etnik pejuang, tapi rejim sudah jatuh curiga pada semua etnik minoritas, melebihi kecurigaan pada kelompok sipil pro-demokrasi.²³

²² <http://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya>, 10 Maret 2009

²³ <http://kingagung.wordpress.com/2009/02/19/seduka-pengungsi-myanmar-teuku-kemal-fasya/>, 5 Februari 2009

Etnis Rohingya yang merupakan etnis minoritas di Myanmar yang beragama Islam mendapat tekanan dari Junta militer yang berakibat adanya pengungsian besar-besaran ke perbatasan Myanmar - Bangladesh pada tahun 1991. Etnis Rohingya mengalami penderitaan semenjak tidak adanya hak untuk mendirikan Negara bagian, bahkan wilayahnya (Arakan) diserahkan kepada etnis Rakhin yang beragama Buddha. Bersamaan dengan itu etnis Rohingya juga tidak mendapatkan kewarganegaraan sehingga terusir dari tanahnya sendiri. Junta militer juga secara keji melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya.

Pemberontakan etnis Karen juga tidak luput tindakan represif Junta militer. Junta militer menyerang penduduk sipil Karen dan melakukan tindakan-tindakan asusila seperti kekerasan seksual terhadap wanita etnis Karen. Pada tahun 1984 Junta menduduki Negara bagian Karen yang merupakan kawasan otonom disebelah timur Myanmar. Militer melakukan penjarahan-penjarahan, pembunuhan, perusakan ladang dan kerja paksa. Penguasa Myanmar dan pemberontak Karen menghentikan perang lima dekade melalui perjanjian informal Desember 2003, namun mereka tidak pernah secara resmi menandatangani perjanjian gencatan senjata.²⁴

Etnis Shan juga merupakan salah satu etnis minoritas yang memerangi pemerintah pusat Myanmar yang dalam hal ini dikuasai oleh militer. Seperti para wanita dari etnis minoritas lain, wanita dari etnis Shan juga sering kali mendapatkan perlakuan asusila seperti tindakan pemerkosaan yang melibatkan anggota militer.

²⁴ <http://www.kapanlagi.com/h/0000067435.html>, 7 Oktober 2008

Jaringan Aksi Perempuan Shan, menunjukkan dalam rentang waktu 2002– 2007 sekurangnya telah terjadi kasus pemerkosaan yang melibatkan militer dan 625 wanita etnis Shan.²⁵

Etnis – etnis minoritas yang ada di Myanmar melakukan pemberotakan dan perlawanan terhadap pemerintahan militer. Mereka juga terusir dari kampung halamannya masing – masing akibat dari adanya tindakan kekerasan oleh militer. Etnis minoritas kebanyakan hidup di pengungsian – pengusian yang ada di perbatasan. Salah satu dari tempat pengungsian yaitu Mae La yang terletak di perbatasan antara Myanmar dan Thailand. Oleh karena banyaknya pembantaian – pembantaian yang dilakukan oleh Junta militer terhadap etnis minoritas yang ada di Myanmar hal tersebut menimbulkan banyaknya ancaman dari dunia internasional yang menyebabkan adanya sanksi terhadap Myanmar.

2. Perlawanan Agresi Junta Militer Terhadap Demonstrasi Pada Tahun 1988 dan 2007

Aksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta militer seringkali dilatarbelakangi adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar. Perlawanan tersebut adalah bentuk dari kekecewaan masyarakat Myanmar terhadap kebijakan – kebijakan dan kepemimpinan Junta militer. Kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintahan militer seringkali dinilai merugikan rakyat Myanmar

²⁵ Kompas, 'Etnis Minoritas Myanmar Masih Menjadi Target Kekerasan', 10 Juni 2005

sendiri. Kebijakan tersebut dinilai hanya untuk kepentingan militer beserta kroni – kroninya saja. Rakyat Myanmar sudah sangat menderita dengan kepemimpinan Junta militer dengan keadaan ekonomi yang kian merosot dan menambah tingginya angka kemiskinan di Myanmar. Kini Myanmar menjadi salah satu dari Negara termiskin di dunia karena kondisi ekonominya yang sangat memprihatinkan.

Hal tersebut bermula ketika pemerintah Junta militer Myanmar mengeluarkan kebijakan dengan tidak memberlakukan lagi uang kertas yang kemudian memancing kemarahan masyarakat Myanmar karena kebijakan tersebut dianggap telah menghancurkan tabungan mereka ditambah dengan buruknya perekonomian Myanmar saat itu. Hal tersebut memancing reaksi keras dari masyarakat sehingga menimbulkan adanya demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan didukung pula oleh biksu dan rakyat. Aksi demonstrasi tersebut mendapatkan perlawanan keras dari pihak militer, demonstrasi yang berlangsung pada tanggal 8 Agustus 1988 menyebabkan korban sekitar 1.000 jiwa. Tindakan represif Junta militer tersebut tidak mengendurkan semangat demonstran.

Demonstrasi ini berlanjut hingga bulan September 1988. Tak kurang dari 3.000 jiwa demonstran tewas akibat bentrok dengan militer dan lebih dari 10.000 mahasiswa melarikan diri ke gunung – gunung dan wilayah perbatasan.²⁶

²⁶ <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35910>, 6 Februari 2009

Pada tahun 2007 pemerintahan militer kembali mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya yaitu dengan menaikkan BBM sebesar 500%. Hal tersebut menimbulkan gelombang unjuk rasa dari para biksu yang meminta pihak masyarakat lain tak ikut dalam aksi mereka. Akan tetapi banyak masyarakat yang ikut bergabung karena sudah tidak tahan atas tindakan pihak penguasa militer yang sewenang-wenang. Para biksu pun tidak mau lagi menerima sumbangan dari pihak militer sikap biksu ini meresahkan pihak militer karena kedudukan biksu sangat dihormati bukan hanya oleh masyarakat tapi pihak militer sendiri.

Gelombang unjuk rasa tersebut juga banyak menelan korban jiwa tidak hanya para demonstran bahkan juga para wartawan yang meliput aksi tersebut seperti wartawan APF Jepang, Kenji Nagai. Akan tetapi pihak militer Myanmar menyamakan jumlah korban tewas yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pada yang diakui secara resmi oleh militer. Militer juga memblokir akses informasi yang berasal dari Negara mereka dengan menghancurkan berbagai jaringan termasuk warung internet yang dapat memudahkan akses dengan dunia luar.

Satu bulan setelah aksi massa tersebut, kampus – kampus yang ada di Myanmar dijadikan sebagai penjara. Lebih dari 6.000 ditahan, termasuk 1.400 biksu. militer Myanmar memenjarakan lebih dari 1.000 orang mahasiswa dan biksu disebuah gudang tanpa jendela di kampus Institut Teknologi Pemerintah pada tanggal

2 Oktober 2007. Para demonstran ini tidak hanya ditahan di gudang-gudang kampus, namun mereka juga ditahan di pabrik – pabrik tua dan lintasan balap.

Oleh karena banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi Myanmar banyak menyebabkan adanya kecaman maupun sanksi yang dijatuhkan oleh dunia internasional terhadap Myanmar. Akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan perbaikan di Myanmar. Pemerintahan militer selalu melakukan kekerasan apabila adanya perlawanan dari rakyat Myanmar.

BAB III

POLITIK DAN KEKUASAAN JUNTA MILITER

Militer berkuasa di Myanmar sejak adanya kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada Perdana Menteri yang berkuasa saat itu yaitu U Nu pada tahun 1962. Pada masa kepemimpinan Junta militer banyak perubahan – perubahan yang di antaranya menggantikan nama “Burma” menjadi “Myanmar” dan sekaligus menggantikan “SLORC” menjadi “*State Peace and Development Council*” (SPDC). Dibawah kepemimpinan Junta militer rakyat Myanmar hidup dalam penderitaan karena terpurukan sistem perekonomian yang dikuasai oleh Junta militer. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Myanmar pun selalu dibalas dengan kekerasan – kekerasan oleh militer yang membuat banyak korban berjatuh setiap adanya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Myanmar.

Dalam ilmu ketatanegaraan, seharusnya militer ini berkedudukan sebagai alat dari birokrat untuk memaksakan peraturan agar dipatuhi oleh rakyatnya serta bertugas melindungi keamanan negara tersebut dari negara lain. Tetapi di Myanmar posisi birokrasi sebagai alat kapitalis dalam melindungi kepentingan bisnisnya ternyata dirangkap juga oleh militer. Sehingga dalam hal ini militer sebagai birokrat secara otoriter dapat mempergunakan kekuatan senjatanya yang tanpa batas untuk pengaturan dan pengawasan rakyatnya guna melindungi kepentingan para kapitalis ini juga memaksakan kehendaknya untuk mematikan pertumbuhan perusahaan kecil

dan menentang, dan mampu pula dengan senjata memaksa buruh bekerja semaksimal mungkin dengan upah seminimal mungkin.²⁷

Kekuasaan militer di Myanmar dengan kediktatorannya menyebabkan adanya sebuah karakteristik politik yang hanya mempedulikan kepentingan rezim yang berkuasa saja serta orang – orang yang dekat dengan kelompok penguasa tersebut. Oleh karena itu karakteristik politik tersebut sebisa mungkin untuk dipertahankan untuk kepentingan yang akan dicapai. Akan dalam karakteristik politiknya, pemerintahan Myanmar tidak mempedulikan nasib rakyatnya yang sebenarnya menderita dengan apa yang diputuskan pemerintahannya.

A. POLITIK ISOLATIF MYANMAR

Dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan – kebijakannya, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negerinya suatu Negara mempunyai karakteristik politiknya masing – masing. Karakteristik politik suatu Negara ditentukan oleh tinggi-rendahnya aspek – aspek yang dapat menentukan karakteristik tersebut. Pada Negara – Negara Asia Tenggara mempunyai karakteristik politik luar negeri yang berbeda – beda. Myanmar merupakan Negara yang mempunyai tingkat demokrasi yang sangat rendah hingga dapat dikatakan bersifat Isolatif. Hal tersebut dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel 3.1

²⁷ <http://maspungky.multiply.com/journal/item/198>, diakses 12 desember 2008

	Opposition Parties	Freedom of Media	Freedom of Association	Economic Development	Independence of Judiciary	National Human Rights Commission
Brunei Darussalam	Allowed but no elections	No	No	High	No	Non existent
Cambodia	Allowed but subjected no harassment	Allowed but subjected no harassment	Allowed within limits	Medium	No	Non existent
Indonesia	Allowed	Allowed	Allowed	Medium	No	Yes
Laos	Not allowed	Not allowed	Not allowed		No	Non existent
Malaysia	Allowed within limits	Allowed within limits	Allowed within limits	Medium	No	Yes but not independent
Myanmar	Not allowed	Allowed	Allowed	Low	No	Not allowed
Philippines	Allowed	Allowed	Allowed	Medium	Yes	Yes
Singapore	Allowed some reserves	Not allowed	Allowed within limits	High	Yes for bussines only	Non existent
Thailand	Allowed	Allowed some reserves	Allowed	Medium	Yes	Yes
Vietnam	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Low	Non existent	Non existen

Sumber: Kek Galabaru ASEAN *Human Rights Scorecard*, dalam *Challenges Facing*

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip

checks and balances.²⁸ Jadi pada karakteristik politik yang bersifat Demokrasi ini kelima aspek yang ada diatas memiliki aktifitas yang tinggi.

Setelah melakukan kudeta seluruh aspek politik Myanmar dipegang oleh pemerintahan militer. Pemerintahan militer memegang kekuasaan secara otoriter dan tidak menyukai adanya campur tangan pihak asing. Usaha untuk menutup Myanmar dari pengaruh dunia luar baik dibidang ekonomi, kebudayaan, maupun politik. Oleh karena itu politik luar negeri Myanmar dibawah kepemimpinan Junta militer dikenal bersifat Isolatif.

Istilah Isolatif ini pertama kali digunakan tahun 1860, terkait politik isolasi Amerika. Isolasionisme, tulis *American Heritage Dictionary*, merujuk pada suatu kebijakan nasional yang absen dari hubungan ekonomi maupun politik negara-negara lain. Isolasionisme menegaskan sikap yang tak mau intervensi, baik terhadap militer maupun politik mancanegara. Tak mau ikut perang, tak mau kirim serdadu ke negeri asing. Perekonomiannya pun proteksionis, semata-mata perlindungan pada ekonomi domestik alias proteksionis. Karena itu isolasionisme tak mau pusing semua yang terjadi di negara lain dan sebaliknya tidak mau dalam negerinya diganggu atau direcoki oleh pihak luar. Jangan campuri urusan internal negeri lain, urusan domestik cukup serahkan pada pihak masing-masing.²⁹ Isolasionis adalah doktrin yang

²⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diakses 12 Januari 2008

²⁹ <http://rpohan.wordpress.com/2008/03/02/page/3/>, diakses 7 Oktober 2008

menuntut sebuah Negara agar membatasi hubungannya dengan Negara lain, khususnya hubungan politik hingga ke taraf yang paling minimum.³⁰

Kevin J.O'Neil, memberi dua deskripsi. Pertama, isolasionisme adalah kecenderungan penyimpangan dalam sikap atau perilaku politik yang bisa menjangkiti tatanan sosio-politik mana pun. Kalau sudah terjangkit oleh penyimpangan ini, maka dia akan mengancam tatanan politik itu dari dalam. Kedua, isolasionisme adalah perwujudan dari "individualisme" dan "egoisme" pada tingkat negara (lembaga). Kalau individualisme lebih mengacu pada perilaku individual (ide Robert Bellah, dalam *Habits of the Heart*-nya), maka isolasionisme mengacu pada keterkurungan politik akibat perilaku individualistik pada tingkat negara. Individualisme sama-sebangun dengan *self-centeredness*. Memang individualisme dan isolasionisme erat terkait satu sama lain.³¹

Dalam kasus politik luar negeri Myanmar kelima aspek diatas yang dapat menentukan karakteristik suatu negara tersebut mempunyai aktifitas rendah. Oleh karena itu karakteristik politik luar negeri dikenal bersifat Isolatif.

1. Kebebasan Berpendapat.

Masyarakat Myanmar tidak mempunyai sedikitpun kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Karena militer selalu memaksakan kehendaknya tanpa sialu peduli kondisi rakyat Myanmar yang sebenarnya. Terbukti dengan banyaknya kebijakan – kebijakan pemerintah Myanmar yang dinilai telah

³⁰ Michael A. Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 103

³¹ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0303/21/opi01.html>, diakses 26 Desember 2008

membuat rakyatnya menderita. Seperti banyak kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Apabila rakyat Myanmar ingin menyampaikan ekspresi kekecewaan mereka terhadap pemerintahannya. Maka pemerintahan Myanmar yang dikuasai oleh militer tersebut akan memberikan perlawanan yang cenderung represif agar tidak ada yang menentang kebijakannya. Dalalam kasus ini dalam dilihat sepak terjang militer ketika melakukan perlawanan kepada para demonstran pada tahun 1988 dan 2007. Hal tersebut menimbulkan banyaknya korban jiwa dari pra demonstran dan menyebabkan banyaknya kecaman dari dunia internasional.

2. Kebebasan Pers.

Tidak seperti di negara lain kebebasan pers di Myanmar sangat dikekang oleh pemerintahannya. Segala pemberitaan yang menyangkut pemerintahan maupun keadaan politik di Myanmar selalu disortir oleh rezim militer yang berkuasa di Myanmar. Oleh karena itu informasi yang berasal dari negara yang dulu bernama Burma ini sangat sulit didapat.

3. Pemilihan Umum yang Tidak Teratur di Myanmar.

Negara ini hanya sekali menjalankan pemilu yaitu pada tahun 1990. Akan tetapi hasil pemilu tersebut tidak mempunyai pengaruh apa – apa terhadap perbaikan politik di Myanmar. Karena partai yang memenangkan pemilu tersebut yaitu *National League for Democratic* (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi tidak diakui kemenangannya dalam pemilu tersebut. Hingga saat ini tidak ada pergantian

kepemimpinan dari pemerintahan militer kepada NLD sebagai pemenang pemilu tahun 1990. Berikut ini adalah hasil pemilihan umum di Myanmar pada tahun 1990.

Tabel 3.2

Hasil Pemilu Myanmar Tahun 1990

Partai	Jumlah Suara	Persen Suara	Kursi
Arakan League for Democracy	160,783	1.2%	11
Chin National League for Democracy	51,187	0.4%	3
Democratic Organisation for Kayan National Unity	16,553	0.1%	2
Kachin State National Congress for Democracy	13,994	0.1%	3
Kayah State Nationalities League for Democracy	11,664	0.1%	2
Mon National Democratic Front	138,572	1%	5
Naga Hills Regional Progressive Party	10,612	0.1	2
National Democratic Party for Human Rights	128,129	1%	4
National League for Democracy	7,943,622	58.7%	392
National Unity Party	2,805,559	21.2%	10
Party for National Democracy	72,672	0.5%	3
Shan Nationalities League for Democracy	222,821	1.7%	23

Ta-ang (Palang) National League for Democracy	16,553	0.1%	2
Union Poah National Organisation	35,389	0.3%	3
Zomi National Congress	18,638	0.1%	2
Minor parties and independents	1,606,858	12.1%	12
Total	13,253,606	100%	492

Sumber: <http://psephos.adam-carr.net/countries/b/burma/burma1990.txt>

4. Tidak Adanya Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Myanmar tidak berjalan dengan semestinya, karena Myanmar sendiri dikuasai oleh rezim yang seringkali melakukan pelanggaran - pelanggaran hukum. Bagi rezim militer Myanmar penegakan hukum berarti tindakan memenjarakan siapa saja yang mengancam eksistensi Junta militer. Seperti tindakan Junta militer yang menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan yang tanpa melalui proses pengadilan. Aung San Suu Kyi adalah tokoh oposisi Myanmar yang meyerukan demokrasi di Myanmar.

5. Hubungan Eksekutif dan Legislatif Tidak Seimbang

Hubungan Eksekutif dan Legislatif yang ada di Myanmar tidak berjalan dengan baik di Myanmar. Karena semua berjalan atas kehendak militer yang berkuasa yang menjadikan badan eksekutif dan legislatif yang ada tidak berjalan sesuai dengan fungsi – fungsinya. Ketika adanya pergantian nama Burma menjadi Myanmar oleh Junta militer, sebenarnya hal tersebut tidak disetujui oleh badan

Legislatif Myanmar. Hal itu menyebabkan adanya pelarangan sidang oleh Junta militer kepada badan legislatif.

B. INDIKASI POLITIK ISOLATIF MYANMAR

Selain dari ciri – ciri diatas indikasi politik Isolatif yang ditunjukkan oleh pemerintahan militer Myanmar juga terdapat pada Hubungan Luar Negeri, Ekonomi serta Politik Myanmar. Militer Myanmar tetap menerapkan politik Isolatif walaupun terdapat hubungan dengan pihak asing.

1. Hubungan Luar Negeri Myanmar

Hubungan luar negeri Myanmar telah dilakukan sejak tahun 1948 dengan menjadi anggota gerakan non blok, pada saat itu Myanmar belum dipimpin oleh Junta militer. Setelah adanya transfer kekuasaan kepada militer perlahan – lahan Myanmar menutup diri dari pihak asing. Hubungan luar negeri Myanmar tidak berjalan baik, hal tersebut karena banyaknya kecaman yang dituduhkan dunia internasional terhadap pelanggaran HAM dan proses penegakan demokrasi di Myanmar. Terutama hubungan dengan Negara – Negara barat yang seringkali memberikan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Dalam hal hubungan luar negeri Myanmar tidak serta merta menutup diri sehingga tidak melakukan kerjasama apapun dengan pihak asing. Myanmar juga melakukan interaksi dengan pihak – pihak yang berada diluar kewasarnya, hal tersebut ditunjukkan Myanmar dengan bergabung dalam organisasi regional Asia Tenggara, yaitu ASEAN pada tahun 2003. Myanmar juga melakukan

kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya pertemuan Dubes RI untuk Myanmar Sebastianus Sumarsono yang bertemu dengan Menteri Transportasi Kereta Api Mayjen Aung Min di Nay Pyi Taw, Myanmar, pekan ini, dalam rangka memperkuat hubungan dan kemitraan Indonesia-Myanmar di sektor ekonomi dan bisnis, terutama bidang perkeretaapian.

Meskipun adanya hubungan dengan pihak asing, militer Myanmar tetap dapat menjalankan politik isolatifnya. Strategi isolatif yang digunakan oleh pemerintah militer yaitu oleh mereka tidak menyukai adanya campur tangan pihak asing dalam persoalan dalam negerinya. Hal ini yang menyebabkan pemerintahan Myanmar bersifat kedap terhadap berbagai aspirasi dari dunia internasional. Junta militer tidak mempedulikan seberapa besar kecaman yang ditujukan pada mereka. Adanya indikasi isolatif tidak hanya ditunjukkan oleh pemerintah Myanmar, tetapi tindakan isolasi terhadap Myanmar pun ditunjukkan oleh beberapa Negara yang dalam hal ini merupakan sanksi yang diberikan kepada Myanmar. Sanksi tersebut seperti sanksi yang diberikan oleh pemerintah Amerika dengan tidak memberikan visa kepada para petinggi militer Myanmar.

Adanya ketidaksukaan militer Myanmar terhadap campur tangan pihak asing juga dilakukan dengan pembatasan berita – berita yang berasal dari dalam dan luar negeri. Serta adanya pembatasan terhadap masuknya wartawan – wartawan asing yang akan melakukan liputan di kawasan Myanmar.

2. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi indikasi isolatif yang ditunjukkan oleh pemerintah Myanmar yaitu adanya ekonomi proteksionis. Proteksi ekonomi merupakan adanya pembatasan produk luar untuk melindungi produsen dalam negeri. Sedangkan yang menjadi produsen di Myanmar adalah junta militer. Kondisi perekonomian Myanmar pernah mengalami masa – masa cerah ketika medeka dari tangan Inggris pada tahun 1948. Sejak terjadinya kudeta yang dilakukan oleh militer pada tahun 1962 Junta telah terlihat adanya proteksionis dalam perekonomian Myanmar yaitu dengan menasionalisasi semua tanah, industri, serta menghapuskan sistem kapitalisme dengan membentuk perencanaan ekonomi baru.

Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama.³² Kepentingan Junta militer dalam perekonomian Myanmar sangat besar oleh karena itu mereka cenderung menutup diri dari dunia internasional untuk menekan pengaruh – pengaruh asing yang dapat dibawa oleh orang – orang yang masuk ke Negara mereka. Pengaruh tersebut seperti dapat munculnya cikal bakal kapitalisme yang akan menghancurkan kekuasaan ekonomi di Myanmar.

Kekuasaan Junta militer yang sangat kuat dalam sistem ekonomi Myanmar tentu saja tidak sesuai dengan konsep kapitalisme dimana pemerintah tidak dapat

³² <http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme>, 12 Desember 2008

melakukan intervensi pasar. Hal ini tentu akan menggoyahkan kekuasaan Junta militer, karena pasar yang akan menjadi penentu. Masuknya sistem kapitalisme pada suatu Negara akan mengubah sistem sosial yang telah melekat pada Negara tersebut, dan resiko atas masuknya kapitalisme salah satunya yaitu sistem demokrasi.

Sebelum dikuasai oleh Junta militer Myanmar merupakan eksportir beras terbesar di dunia, tetapi pada pertengahan 1970an Burma tidak mampu memproduksi cukup beras untuk member makan populasinya sendiri. Pendapatan perkapita juga jatuh dari \$670 pada tahun 1960 ke \$200 pada tahun 1980. Kasta militer birokrat ini cepat menjadi pengekan perkembangan kekuatan produksi.³³

Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Junta militer hanya menguntungkan bagi pihak militer beserta kroni – kroninya. Kebijakan tersebut justru menjadikan rakyatnya bertambah miskin dengan mengambil alih semua lahan serta toko kecil yang sebelumnya dikelola oleh rakyat. Pemerintah militer bahkan menutup sekolah – sekolah tari dan melarang turis masuk. Hal tersebut otomatis menghancurkan perekonomian rakyat Myanmar.

Statistik ekonomi Myanmar tidak mudah didapatkan. Sejak tahun 1997, para jendral bahkan tidak mempublikasikan anggaran dasar negara yang formal, dan angka-angka yang mereka berikan tidak dapat dipercaya. Pada periode yang sama angka-angka mengenai kesehatan, pendidikan, dll sangatlah langka. Tetapi, berdasarkan beberapa perkiraan, "rejim ini diperkirakan menggunakan 40% dari

³³ <http://www.marxist.com/tragedi-myanmar.htm>, 2 Desember 2008

anggaran belanja mereka untuk pertahanan dan persenjataan", tetapi hanya membelanjakan kurang dari 1% GDP untuk kesehatan dan pendidikan. Arak, dan juga rendahnya perkembangan ekonomi. Dari populasi yang mendekati 50 juta, ada 29 juta pekerja, tetapi 70% dari pekerja ini bekerja di pertanian. 50% GDP datang dari pertanian, dan hanya 15% datang dari industri. Dan pengangguran diperkirakan di atas 10%. GDP per kapita pada tahun 2006 adalah \$1800. Akan tetapi, statistik ini menyembunyikan distribusi kekayaan yang sesungguhnya. 10% populasi yang paling miskin hanya mengkonsumsi 2.8% dari kekayaan nasional, sedangkan 10% populasi yang terkaya mengkonsumsi 32.4% (statistik tahun 1998). Ini diperparah dengan tingkat inflasi yang semakin membengkak yang sekarang di atas 20%. Ini menjelaskan mengapa 25% rakyat Myanmar hidup di bawah garis kemiskinan.³⁴

Ada beberapa identifikasi distorsi yang telah menyebabkan perekonomian Myanmar hancur.³⁵

- Pengutamaan politik atas perekonomian;
- Administrasi yang melemah;
- Konsekuensi dan nasionalisasi sektor perdagangan, industry, perbankan, dan pendidikan;
- Perusahaan ekonomi Negara yang tidak sehat dan tidak efisien;
- Inflasi dan pasar gelap;

³⁴ Ibid. <http://www.marxist.com/tragedi-myanmar.htm>

³⁵ Mya Than & Josepeh L.H Tan, Transisi Ekonomi 1990-an: Tantangan dan Dilema Myanmar (LBOES, 1993), hal 27.

- Penetapan harga yang tidak realistis
- Dominasi peran militer dibidang ekonomi.

Dari semua distorasi tersebut akhirnya terakumulasi ke dalam system ekonomi Myanmar yang macet. Militer praktis menguasai dan mengontrol seluruh sendi kehidupan rakyat. Ibaratnya tak ada sejengkal tanah diseluruh kawasan Myanmar yang tidak bisa “diinjak” tentara. Militer menguasai segala, termasuk aneka bisnis dari hulu sampai hilir.³⁶

Pada tahun 1987 rejim militer mengumumkan bahwa uang lembaran kertas yang dipakai dalam perekonomian pada saat itu tidak diberlakukan lagi. Dengan adanya kebijakan tersebut maka akan menghancurkan tabungan yang dibuat oleh rakyat. Hal tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar – besaran yang dipelopori oleh mahasiswa. Akan tetapi demo tersebut ditanggapi secara brutal oleh militer, mereka menembaki para demonstran dengan membabi buta di depan balai kota Yangon. Hal itu menyebabkan banyaknya warga sipil yang meninggal yang diperkirakan mencapai 3000 orang korban.

Pemerintah Myanmar kembali mengambil kebijakan ekonomi yang membebani rakyatnya ketika pada tanggal 13 Agustus 2007 pemerintahan Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Senior Than Shwe, mengumumkan bahwa adanya kenaikan BBM sebesar 500%. Kenaikan harga BBM ini telah menyebabkan harga

³⁶ *ibid.*

gas naik 5 kali lipat, harga bensin dan harga diesel naik 2 kali lipat. Sekitar 90% rakyat Myanmar hidup dalam kemiskinan. Setelah harga BBM naik, harga kebutuhan pokok rata – rata langsung naik sebesar 35%.³⁷

C. TUNTUTAN DEMOKRASI DI MYANMAR

Selama dipimpin oleh rezim militer, rakyat Myanmar terbelenggu oleh kekuasaan militer yang sangat mendominasi di Myanmar. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Myanmar tidak bisa menungkapkan aspirasinya akibat adanya pemerintahan militer yang otoriter memimpin Negara mereka. Sehingga tuntutan demokrasi sangat deras mengalir di Myanmar. Tuntutan demokrasi tersebut telah ada semenjak adanya kegagalan pemerintah sosialis yang tidak dapat memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Rakyat Myanmar menuntut adanya perbaikan kondisi ekonomi dan sosial politik serta menuntut diadakannya pemilu dengan sistem multi partai yang demokratis.

Tuntutan tersebut disampaikan melalui demonstrasi yang diprakarsai oleh mahasiswa. Para demonstran menuduh Ne Win bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Myanmar akibat dari kebijakan – kebijakannya. Pada bulan Juli 1988 Ne Win memundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Sein Lwin. Kondisi Myanmar pasca pergantian kepemimpinan tidak langsung membaik bahkan semakin bertambah buruk

³⁷ *Kompas*, “Senyum Para Jenderal Tangisan Rakyat Jelata”, 27 September 2007.

Sein Lwin lebih meningkatkan peranan militer untuk mengatasi para demonstran. Demonstrasi yang menuntut adanya perubahan tidak berhenti yang merupakan ekspresi dari kekecewaan rakyat Myanmar selama dibawah pimpinan militer. Akan tetapi kekecewaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh rakyat tetapi juga oleh beberapa anggota militer, yang kemudian berpihak pada rakyat dengan membuka gudang – gudang senjata.

Demostrasi tersebut membuat Sein Lwin memundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Dr. Maung Maung mantan Mahkamah Agung. Pada masa pemerintahan Maung Maung inilah terdapat adanya janji – janji diwujudkannya pemerintahan yang demokrasi. Hal tersebut terlihat ketika pemerintah memberikan kesempatan kepada partai – partai yang ada di Myanmar dan tidak lagi menerapkan system partai tunggal. Pada tanggal 27 Mei 1990 pemerintah SLORC yang diketuai oleh Saw Maung mengadakan pemilihan umum untuk yang pertama kalinya di Myanmar. Pemilu tersebut diikuti oleh beberapa partai diantaranya *National League of Democracy* pimpinan Aung San Suu Kyi dan National Unity Party sebagai perwakilan Junta militer serta partai – partai dari berbagai etnis di Myanmar.

Pemilu pertama tersebut dimenangkan oleh National League for Democracy yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Akan tersebut kemenangan tersebut tidak diakui oleh pemerintahan Junta militer. Pemerintahan militer mengulur waktu untuk pemindahan kekuasaan untuk menyusun sebuah konstitusi baru. Akan tetapi hingga

saat ini tidak ada pemindahan kekuasaan kepada *Natioanl League for Democracy* dan rezim militer masih berkuasa di Myanmar.

Pada tahun 1997 pemerintahan Junta militer berganti nam menjadi *State Peace and Development Council* yang di saat ini diketuai oleh Than Shwe. Pemerintahan SPDC juga tidak membawa perubahan kepada demokratisasi di Myanmar akan tetapi justru cenderung represif terhadap pihak – pihak yang pro demokrasi. Pada era pemerintahan SPDC banyak dilakukan intimidasi maupun penangkapan - penangkapan terhadap anggota NLD. Hal itu karena adanya pembentukan *Committee Representing People's Parliament* (CRPP) yang merupakan sebuah parlemen yang menjadi tandingan dari parlemen pemerintah militer. Banyak dari anggota CRPP yang ditahan beserta pendukung NLD lainnya.

Pemerintah militer juga melakukan hal yang sama kepada pimpinan NLD Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi juga kerap mendapatkan intimidasi dari pihak militer. Sejak Mei tahun 2008 pemerintah militer memberlakukan tahanan rumah kepada penerima Nobel Perdamaian ini. Hal ini juga memancing reaksi dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa penahanan Aung San Suu Kyi melanggar undang - undang internasional. Pemerintahan militer menganggap Aung San Suu Kyi sebagai ancaman terhadap pemerintahan mereka. Oleh karena itulah militer memberlakukan status tahanan rumah terhadap Aung San Suu Kyi untuk mencegah adanya pengumpulan massa yang akan dilakukan Aung San Suu Kyi

untuk melawan pemerintahan militer apabila berada di luar rumah mengingat banyaknya pendukung Aung San Suu Kyi.

D. REAKSI DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP PEMERINTAHAN JUNTA MILITER

Selama berada dalam kekuasaan militer terjadinya pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh rezim tersebut membuat banyak kecaman – kecaman yang timbul dari dunia internasional. Kecaman – kecaman tersebut berupa sanksi maupun embargo baik itu yang dilakukan oleh Negara lain maupun organisasi internasional. Sanksi yang diterima oleh Myanmar kebanyakan berupa sanksi – sanksi ekonomi, hal tersebut tidak menimbulkan efek jera pada pemerintah Junta militer. Akan tetapi mereka menuduh bahwa sanksi – sanksi tersebutlah yang menyebabkan perekonomian Negara mereka semakin memburuk.

Salah satu dari organisasi yang seringkali memberlakukan sanksi terhadap Myanmar adalah Uni Eropa. Sebuah organisasi antar pemerintahan yang terdiri dari Negara – Negara Eropa ini telah berkali – kali memberlakukan sanksi terhadap Myanmar. Hal tersebut telah dilakukan sejak tahun 1990, sanksi – sanksi yang dikenakan terhadap Myanmar baik berupa sanksi keamanan, perdagangan, atau diplomatik. Seperti pada tahun 1996 Uni Eropa memberikan sanksi berupa

pelarangan penjualan senjata dan peralatan militer kepada Myanmar. Sanksi ekonomi lainnya yaitu dengan memblokir impor kayu dan logam mulia dari Myanmar. Akan tetapi Uni Eropa memberikan pengecualian terhadap Perancis yang mempunyai perusahaan minyak yang beroperasi di Myanmar. Uni Eropa juga melakukan pencekalan terhadap pejabat militer Myanmar dengan tidak memberikan visa terhadap pejabat – pejabat tersebut.

Myanmar menjadi anggota ASEAN sejak 23 Juli 2003 sebagai salah satu anggota ASEAN, masalah Myanmar juga menjadi perhatian yang cukup serius bagi ASEAN. Ditingkat Asia Tenggara isu tentang Myanmar juga dianggap sebagai pertarungan citra ASEAN dimata dunia internasional yang juga mempengaruhi hubungan ASEAN dengan Negara – Negara lain maupun institusi internasional lainnya. Karena pola hubungan ASEAN dengan aktor lain diluar kawasan Asia Tenggara ditentukan dengan seberapa seriusnya ASEAN dalam mengatasi masalah Myanmar.

Tekanan internasional yang datang bertubi – tubi terhadap Myanmar agar menjalankan demokratisasi dan penghormatan terhadap hak azazi manusia sepertinya akan terus berlangsung selama Junta militer tidak merubah posisi mereka selama ini. Sementara itu, ASEAN, meskipun telah maju dalam kebijakan – kebijakan mereka terhadap Myanmar, sejauh ini juga belum berhasil merubah posisi Junta. Sanksi – sanksi dan tekanan terhadap Myanmar tetap diperlukan untuk menunjukkan kepada

Junta militer bahwa mereka tidak pernah akan diakui oleh masyarakat Myanmar sendiri maupun dunia internasional selama masih terjadinya pelanggaran – pelanggaran hak asasi manusia.

Ketidakberhasilan ASEAN dalam menangani kasus Myanmar tersebut disebabkan oleh prinsip organisasi yang masih mengedepankan *non-interference* dimana suatu negara tidak boleh mencampuri urusan negara lainnya. Meskipun ini menjadi hal yang dilematis dalam suatu pemerintahan untuk memperbolehkan negara lain mencampuri urusan domestik, tetapi ini adalah suatu keniscayaan dalam proses integrasi kawasan. Sejauh ini tindakan yang diambil oleh ASEAN hanya berupa kecaman – kecaman dan belum berupa tindakan yang dapat memberi efek jera terhadap pemerintahan Junta militer.

Negara lain yang sering aktif menerapkan sanksi terhadap Myanmar yaitu Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat karena melihat banyaknya pelanggaran HAM oleh militer serta tidak adanya demokrasi di Myanmar. Amerika Serikat pernah membawa isu Myanmar ke Dewan Keamanan PBB sehingga mengeluarkan resolusi yang menyebutkan bahwa Myanmar adalah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Pada tahun 2003, Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu George Walker Bush menandatangani UU mengenai pengenaan sanksi terhadap Myanmar yang telah disetujui oleh *House of Representative*. UU tersebut menyebutkan bahwa

adanya larangan impor barang dari Myanmar dan pembekuan aset pemerintah militer Myanmar yang berlangsung selama tiga tahun. UU tersebut juga mencakup larangan pemberian visa AS yang berlaku kepada pemimpin – pemimpin Myanmar.

Banyaknya sanksi yang yang diberlakukan oleh Negara ataupun organisasi internasional diluar Myanmar tidak membuat adanya efek jera terhadap militer Myanmar. Pemerintah Myanmar malah menuding bahwa hancurnya perekonomian Myanmar saat ini diakibatkan oleh banyaknya sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Negara mereka.

BAB IV

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB POLITIK ISOLATIF MYANMAR DIBAWAH PEMERINTAHAN MILITER

Myanmar merupakan sebuah Negara yang telah lama berada dalam jajahan Inggris. Ketika mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1948 Myanmar menganut system parlementer akan tetapi sistem tersebut hancur bersamaan dengan adanya kudeta oleh militer pada tahun 1962. Setelah adanya kudeta oleh militer tersebut kondisi Myanmar berangsur – angsur memburuk. Hal tersebut dikarenakan adanya keotoriteran kepemimpinan oleh militer. Seluruh aspek politik Myanmar dipegang oleh pemerintahan militer. Pemerintahan militer tidak hanya berkuasa di pemerintahan tetapi juga menjadi aktor utama yang menjalankan perekonomian di Myanmar.

Dengan menerapkan sistem Sosialisme Gaya Burma Jenderal Ne Win mengambil alih seluruh perusahaan serta berkuasa penuh terhadap perekonomian Burma. Pemerintahan militer memegang kekuasaan secara otoriter dan tidak menyukai adanya campur tangan pihak asing. Oleh karena politik luar negeri Myanmar dikenal bersifat Isolatif. Sikap yang menutup diri yang dilakukan oleh Myanmar yaitu dengan adanya pembatasan dari berbagai hal yang datang dari luar. Kalangan pers, pengacara, dan kaum intelektual yang belajar diluar negeri dibatasi bahkan dilarang untuk menunjukkan aktifitasnya diluar negeri. Pemerintah juga

memberlakukan hal yang sama terhadap media asing yang ingin melipat kondisi Myanmar, pemerintah pun selalu mensortir media lokal terhadap berita – berita yang akan dipublikasikan. Seperti salah satu ciri dari politik Isolatif yaitu proteksi ekonomi. Pemerintah Myanmar juga memberlakukan proteksi terhadap ekonomi negaranya, untuk mencegah adanya intervensi dari luar.

Sikap politik Isolatif yang ditunjukkan oleh pemerintahan militer Myanmar dilakukan karena adanya kepentingan – kepentingan tertentu yang menguntungkan rezim penguasa Myanmar yang dalam hal ini adalah militer. Sikap Isolatif tersebut juga didukung oleh pihak asing yang mendukung eksistensi Junta militer sebagai penguasa di Myanmar karena selain menguntungkan bagi mereka tetapi juga bagi pihak militer Myanmar.

Berdasarkan konsep Model Aktor Rasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Pemerintahan militer Myanmar mempunyai alasan – alasan yang tertentu yang digunakan untuk melindungi kekuasaan mereka yang telah membawa keuntungan sangat besar dan telah mereka kuasai selama memimpin negara tersebut.

Dalam politik Isolatif Myanmar terdapat beberapa kepentingan – kepentingan dari rezim yang berkuasa di Myanmar, yaitu rezim militer. Kekhawatiran – kekhawatiran Myanmar akan adanya pengaruh dari dunia luar terhadap negaranya yang akan menyebabkan goyahnya kekuasaan mereka di Myanmar. Hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan yang ingin dicapai oleh rezim militer Myanmar itu. Hal tersebut juga digunakan untuk mempertahankan keuntungan – keuntungan yang

telah didapatkan oleh militer selama berkuasa. Keuntungan – keuntungan yang diperoleh militer tersebut didasarkan pada cara pandang militer dalam mengartikan politik Isolatif tersebut.

A. PANDANGAN MILITER TERHADAP POLITIK ISOLATIF

Politik Isolatif merupakan politik yang sifatnya cenderung menutup diri dari dunia internasional dan tidak menyukai adanya campur tangan pihak asing dalam politik dalam negerinya. Myanmar mengalami masa politik isolative sejak adanya kudeta yang dilakukan oleh militer pada tahun 1962. Militer berkuasa di Myanmar karena adanya perpecahan pada pemerintahan saat itu yaitu AFPFL, sementara pada saat itu militer merupakan satu – satunya lembaga yang kuat dengan system organisasi yang jelas serta mempunyai kemampuan untuk mengontrol masyarakat Myanmar yang pada saat itu banyak sekali pemberontakan – pemberontakan yang dilakukan oleh etnis – etnis di Myanmar. Dalam hal ini politik Isolatif dinilai efektif untuk menekan banyak pemberontakan – pemberontakan di Myanmar. Politik Isolatif dalam cara pandangan militer Myanmar terkait dengan stabilitas nasional dan ekonomi.

1. Stabilitas Nasional

Pada awal masa kepemimpinan Junta militer di Myanmar, banyak terdapat pemberontakan – pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok – kelompok etnis di Myanmar. Hingga saat ini pun pemberontakan – pemberontakan tersebut masih

seringkali terjadi. Hal ini membuat Junta militer harus dengan sigap menyelesaikan pemberontakan tersebut. Tidak hanya pemberontakan dari beberapa etnis tapi juga dari kelompok – kelompok pro demokrasi. Jika militer tidak melakukan upaya penindakan maka pemberontakan tersebut akan mengancam kepentingan – kepentingan militer.

Kepentingan politik Junta militer terhadap Myanmar yaitu adalah kekuasaan militer dalam pemerintahan Myanmar. Oleh sebab itu militer melakukan banyak cara agar sebisa mungkin tetap menguasai negeri Seribu Pagoda tersebut. Politik Isolatif Myanmar dalam era kepemimpinan Junta militer yang berkuasa sejak tahun 1962 merupakan bentuk dari keinginan militer untuk memperlihatkan eksistensinya dalam politik di Myanmar. Rezim militer ini sangat ketakutan dengan pengaruh – pengaruh asing yang akan membawa perubahan yang tidak baik terhadap posisinya di pemerintahan Myanmar. Hal tersebut sangatlah rasional mengingat besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh militer terhadap seluruh aspek yang ada di Myanmar. Sejak berkuasa pada tahun 1962 hingga saat ini telah banyak perlawanan – perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar terhadap pemerintahan militer. Akan tetapi sampai saat ini Junta militer masih dapat mengontrol segala bentuk perlawanan yang ditunjukkan pada mereka dengan adanya kekerasan maupun hukuman terhadap siapa saja yang melawannya. Seperti yang dilakukan Junta militer terhadap tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi. Junta militer memberlakukan status tahanan rumah terhadap Aung San Suu Kyi. Status tahanan rumah yang

diberlakukan. Junta militer terhadap Aung San Suu Kyi adalah karena adanya ketakutan Junta militer akan adanya pengumpulan massa yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi untuk menggulingkan pemerintahan militer apabila Aung San Suu Kyi berada diluar rumah.

Ketika terjadinya demonstrasi besar – besaran oleh masyarakat Myanmar pada tahun 1988 serta disusul oleh lengsernya Ne Win sebagai penguasa saat itu. Pemerintahan Myanmar kemudian dipimpin oleh Saw Maung yang mendirikan SLORC. Pada masa pemerintahan Saw Maung inilah adanya kebijakan kearah demokrasi dengan menerapkan system multipartai serta janji pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum. Pada tahun 1990 inilah Myanmar untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan umum. Pemilu tersebut dimenang oleh partai *National League for Democracy* pimpinan Aung San Suu Kyi. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada perpindahan kekuasaan dari militer kepada partai yang memenangkan pemilu tersebut. Kemenangan Partai *National League of democracy* pada pemilu 1990 menggambarkan bahwa adanya kejenuhan masyarakat Myanmar terhadap pemerintahan militer yang berkuasa. Oleh karena itu masyarakat menginginkan perubahan dengan terciptanya demokrasi di Negara mereka. Akan tetapi hingga saat sistem demokrasi belum berjalan di Myanmar.

Masuknya demokrasi ke Myanmar jelas akan menggoyahkan posisi militer dalam pemerintahan Myanmar. Karena sebagai penguasa pemerintahan militer mendapat keuntungan sebagai aktor utama dalam perpolitikan Myanmar yang dapat

membuat berbagai kebijakan. Dalam pandangan militer, demokrasi kerap diartikan dengan membiarkan kepentingan nasional tercabik-cabik oleh kapitalisme global dan kekuatan-kekuatan asing yang perlahan – lahan akan kedaulatan negara.

Menurut kamus, demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas.” Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” Demokrasi juga bisa dimaknai sebagai bentuk masyarakat yang menghargai-hak-hak asasi manusia secara sama, menghargai kebebasan dan mendukung toleransi, khususnya terhadap pandangan-pandangan kelompok minoritas.³⁸

Demokrasi yang dikenai dengan pemerintahan oleh rakyat ini berarti akan adanya peralihan kekuasaan dari militer terhadap partai NLD yang memenangkan pemilu pada tahun 1990. Hal tersebut inilah yang ditakutkan oleh Junta militer. Adanya sifat Isolatif tersebut dinilai efektif oleh Junta militer dinilai untuk menutupi dosa – dosa yang telah dibuat oleh rezim militer. Sejak Myanmar dikuasai oleh Junta militer tidak sedikit pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim tersebut. Dimulai dari pembantaian yang dilakukan oleh Militer terhadap etnis – etnis minoritas. Adanya tindakan tersebut membuat etnis minoritas terusir dari tanah mereka sendiri dan meratap diperbatasan India maupun Bangladesh. Salah satu etnis minoritas yang

³⁸ <http://sorak-aceh.or.id/Data/Public-Policy-Advocacy-Division/Definisi-Demokrasi.html>

mengalami kekejaman dari militer Myanmar adalah etnis Rohingya yang beragama Islam

Etnis Rohingya diusir dari desa mereka serta melakukan pelecehan Terhadap kaum wanita, di Arakan ketika tentara tiba-tiba masuk ke dalam rumah etnis Rohingya pada tengah malam dan memperkosa kaum wanita di depan suami dan anak-anak mereka. Pengaduan terhadap perlakuan ini hanya akan berujung pada penahanan oleh polisi terhadap pelapor bahkan dalam banyak kasus sang pelapor malah disiksa dan dibunuh. Di sisi lain pihak junta juga mempersulit gadis-gadis Rohingya untuk menikah.

Junta militer juga memberikan perlawanan pada para demonstran yang kecewa terhadap kepemimpinan mereka. Perlawanan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penembakan secara membabi buta kepada para demonstran sehingga banyaknya korban jiwa. Tindakan represif Junta militer yang sangat terkenal adalah perlawanan terhadap demonstran yang kecewa terhadap perekonomian Myanmar pada tahun 1988 dan 2007.

Hal – hal seperti inilah yang ingin ditutupi oleh Junta militer dengan politik Isolatifnya. Dengan politik Isolatif akan mengurangi adanya publikasi kondisi sebenarnya yang terjadi di Myanmar. Pada tahun 2007 ketika terjadi demonstrasi besar yang memprotes kenaikan harga BBM, militer Myanmar sempat memutuskan

akses internet di Myanmar agar video yang merekam kekerasan mereka terhadap demonstran tidak meyebarluas.

Oleh karena itu sangat penting bagi Junta militer untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Karena apabila sebuah rezim telah menguasai kondisi politik dinegaranya maka mereka berhak mengatur segala kebijakan untuk Negara. Akan tetapi dalam kasus ini kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintah militer, hanya menguntungkan bagi mereka saja. Sedangkan rakyat Myanmar mengalami penderitaan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintahannya.

2. Ekonomi.

Perekonomian Myanmar sangat terpuruk pada era kepemimpinan Junta militer. Sejak berkuasa di Myanmar, junta militer langsung mengambil alih sektor perekonomian di Myanmar. Jenderal Ne Win memberlakukan sistem Sosialisme Gaya Burma dengan memasionalisasikan seluruh perusahaan. Akan tetapi sosialisme ini tidak menguntungkan rakyat Myanmar sedikitpun dan hanya memberikan keuntungan pada pihak militer. Meski Myanmar merupakan salah satu Negara yang kaya akan gas alam, kesejahteraan masyarakat Myanmar masih sangat dibawah rata – rata. Hal itu dikarenakan pajak – pajak yang dihasilkan dari eksploitasi SDA dari berbagai perusahaan asing masuk ke kantong militer.

Statistik ekonomi Myanmar tidak mudah didapatkan. Sejak tahun 1997, para Jenderal bahkan tidak mempublikasikan anggaran dasar negara yang formal, dan

angka – angka yang mereka berikan tidak dapat dipercaya. Statistik – statistik yang tersedia menunjukkan kesengsaraan rakyat Myanmar yang parah, dan juga rendahnya perkembangan ekonomi. Kehancuran perekonomian Myanmar tidak lepas dari tidak adanya keahlian militer dalam mengurus bidang ekonomi. Saat ini Myanmar menjadi salah satu Negara miskin di dunia. Padahal sebelum dikuasai oleh rezim militer Myanmar menjadi salah satu Negara pengekspor beras terbesar di dunia. Akan tetapi saat ini menjadi salah satu Negara termiskin di kawasan Asia Tenggara.

Kekuasaan Junta militer pada bidang ekonomi sudah terlihat ketika awal masa kekuasaan militer di Myanmar. Ketika itu jenderal Ne win menerapkan system Sosialisme Gaya Burma. Hal tersebut menjadikan adanya nasionalisasi yang dilakukan Ne Win terhadap perusahaan – perusahaan serta tanah yang ada di Myanmar. Sebelum dikuasai oleh militer perekonomian Myanmar bisa terbilang sangat baik. Sebelumnya, Myanmar merupakan eksportir beras terbesar di dunia, tetapi pada pertengahan tahun 1970an Myanmar tidak mampu memproduksi cukup beras untuk member makan populasinya sendiri. Pendapatan per kapita juga jatuh dari \$670 pada tahun 1960 ke \$200 pada tahun 1989.³⁹

Junta militer merupakan aktor utama dalam menjalankan perekonomian Myanmar. Pemerintah berkuasa penuh terhadap ekonomi di Negara tersebut. Pada masa awal kekuasaannya militer di Myanmar Ne Win menghapuskan system kapitalis

³⁹ *ibid*

dan merubahnya dengan system Sosialis. Keuntungan yang militer yang didapatkan dari menguasai perekonomian Junta yaitu kebebasan mereka menjalankan perekonomian untuk mensejahterakan kehidupan para Jendral militer beserta kroni – kroninya saja.

Oleh karena itu tidak heran kalau banyak dari elit militer Myanmar dikenal sangat kaya raya. Hal tersebut terlihat dengan ketika Jenderal Than Shwe menikahkan putrinya Thandar Shwe dengan Mayor Zaw Phyo Win. Jenderal Than Shwe mengadakan pesta pernikahan yang sangat mewah sangat kontras dengan kondisi warganya yang sedang terhimpit masalah ekonomi. Kekayaan tersebut didapatkan dari bisnis yang dilakukan oleh anggota militer Myanmar tersebut.

Negara yang terkenal mempunyai sifat politik yang Isolatif seperti Myanmar juga terkenal dengan perekonomiannya yang bersifat proteksionis. Sifat proteksionis terhadap ekonomi adalah untuk melindungi produsen lokal dari intervensi asing, berlawanan dengan system Kapitalisme yang tidak mengizinkan campur tangan pemerintah, system Proteksionis justru dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itulah pemerintah militer Myanmar sangat berkuasa pada aspek ekonomi Myanmar. Keuntungan yang diperoleh militer ketika menguasai perekonomian di Myanmar yaitu adanya kebebasan untuk menentukan upah buruh dengan serendah – rendahnya. Hal tersebut jelas menguntungkan militer karena mereka akan mengeluarkan lebih sedikit uang untuk membayar buruhnya sementara mereka memperoleh banyak keuntungan dari berbagai bisnis yang mereka jalankan.

Ekonomi yang bersifat proteksionis juga untuk melindungi produk lokal, dimana elite militer Myanmar lah yang menjadi produsen. Mereka menginginkan produksi mereka akan menjadi kebutuhan utama bagi masyarakatnya, sehingga produk asing ditekan untuk tidak memasuki Negara mereka. Hal ini sangat menguntungkan bagi militer Myanmar yang menguasai perusahaan – perusahaan pengasil kebutuhan masyarakat Myanmar. Berikut adalah perusahaan – perusahaan yang dikuasai oleh Jenderal Junta militer maupun kroni – kroninya.

Tabel 4.1

Perusahaan Milik Militer di Myanmar

PEMILIK	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
Zaw Zaw	Max Myanmar Group	Bisnis permata, kayu, konstruksi dan pariwisata
Tay Za Direktur: Aung Thet Maan (anak Jenderal Thura Shwe Mann)	- Maskapai Air Bagan - Hotel Escape Avenir - Htoo Trading Company Limited	
Win Aung (mantan Menteri Luar Negeri Myanmar 1998 – 2004)	- Dagon International Limited - Dagon Timber Limited	-
Militer	- Myanmar Ivanhoe Copper Company Limited	-
U Tay Htay Myint	Yuzana Company Limited	
Khin Shwe	Zay Gabar Company	

B. Dukungan Cina Terhadap Pemerintah Militer.

Meskipun pemerintahan militer Myanmar dikenal sebagai pemerintahan yang banyak melakukan pelanggaran HAM serta tidak adanya Demokrasi yang menyebabkan banyaknya kecaman dari dunia internasional yang mengharapakan lengsernya militer sebagai penguasa di Myanmar. Akan tetapi tidak serta merta menjadikan Myanmar tidak mempunyai pendukung. Dalam hal ini ada Negara – negara tertentu yang mendukung eksistensi Junta militer di Myanmar. Negara tersebut mempunyai kepentingan – kepentingan yang mana akan terwujud apabila Junta militer berkuasa. Sedangkan Junta militer sendiri membutuhkan dukungan asing tersebut untuk menguatkan posisinya di pemerintahan Myanmar.

Salah satu Negara yang signifikan memberikan dukungan pada pemerintahan militer Myanmar adalah Cina. Cina merupakan Negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar sehingga banyak paham – paham yang berasal dari Cina masuk ke Myanmar. Seperti paham Sosialisme Cina yang dianut oleh Jenderal Ne Win pada awal masa kekuasaan militer di Myanmar. Kesamaan juga terjadi pada pemerintahan kedua Negara yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang mana pemerintahan Cina dikuasai oleh kelompok PKC sedangkan Myanmar dikuasai oleh kelompok militer. Seperti halnya dengan Myanmar, Cina juga merupakan Negara yang seringkali terdengar dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para aparat negaranya. Negara tersebut juga sering mengabaikan hak politik masyarakatnya serta rendahnya kebebasan pers.

Dukungan Cina terhadap eksistensi militer dilakukan dengan mendukung Junta militer melawan pihak oposisi, hal tersebut juga dilakukan Cina dinegaranya dengan selalu menekan pihak oposisi Cina. Akan tetapi Cina tidak mendukung Myanmar secara cuma - cuma, mereka mengharapkan sebuah timbal balik yang akan menguntungkan bagi mereka. Cina mempunyai kepentingan – kepentingan yang akan mereka keruk lewat eksistensi militer di Myanmar.

1. Kepentingan Cina

Kepentingan Ekonomi merupakan faktor utama yang menjadikan adanya kedekatan antara Cina dan Myanmar disamping faktor – faktor lainnya. Sebagai Negara yang kaya akan gas alam tentu saja Myanmar menjadi menarik bagi Cina. Kedekatan Cina – Myanmar dimulai ketika pada tahun 1988 *Official Development Assistance (ODA)* yang merupakan sebuah lembaga keuangan multinasional, mencabut bantuan terhadap Myanmar. Hal tersebut membuat adanya kehancuran ekonomi di Myanmar. Pada saat itulah Cina datang dengan menanamkan investasi di Myanmar. Investasi tersebut dilakukan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam yang ada di Myanmar.

Oleh karena itu saat ini banyak perusahaan – perusahaan Cina yang melakukan eksploitasi di Myanmar seperti *China's Dian-Qian-Gui Petroleum Exploring Bureau* dan *China National Heavy Machinery Corporations*. Perusahaan tersebut dapat melakukan eksploitasi di Myanmar dengan tidak susah payah

membayar upah buruh. Karena pemerintah militer menetapkan upah buruh di Myanmar dengan sangat rendah sehingga perusahaan – perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan yang maksimal tanpa adanya pengeluaran besar untuk membayar buruh. Hal inilah yang disukai oleh investor Cina yang menanamkan modal di Myanmar. Oleh karena itu Cina senantiasa mendukung eksistensi Junta militer dan kebijakan – kebijakannya yang dinilai menguntungkan bagi investor Cina tersebut.

Investasi RRC di Myanmar antara lain di bidang, pertanian, perikanan, perumahan, infrastruktur, yang meliputi jalan, jembatan, jalur kereta api, dll. Antara tahun 1991 dan 1992 Myanmar membeli mesin, rel, dan gerbang kereta. Pada tahun 1994, Myanmar membeli 5000 ton baja dari RRC untuk konstruksi jembatan yang menghubungkan Sungai Ayeyarwaddy di pusat wilayah Myanmar. Secara garis besar investasi RRC di Myanmar meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini akan disajikan tabel yang menggambarkan nilai investasi RRC di Myanmar.⁴⁰

Tabel 4.2

Nilai Investasi RRC Terhadap Myanmar Tahun 1995 – 2001

Tahun	Investasi (dalam juta dolar AS)
1995 – 1996	0,150

⁴⁰ S.L. Muni, *China's Strategic Engagement with the new ASEAN*, Institute of Defense and Strategic Studies Nanyang University, Singapore, 2002, hal. 97.

1996 – 1997	23, 110
1997 – 1998	0,500
1998 – 1999	2,666
1999 – 2000	-
April 2000 – Desember 2001	28,980
Total	54,420

Sumber: Selected Monthly Economic Indicators Nov-Dec 2000 (Yangon: Central Statistical Organization, Ministry of National Planning and Economic Development, Government of the Union of Myanmar)

Hubungan Cina dan Myanmar dalam bidang ekonomi merupakan suatu hubungan yang terjalin baik antara kedua penguasa kedua Negara tersebut. Dalam hal peran Junta militer menjadi menjadi pelindung atas kepentingan – kepentingan asing tersebut dengan memberikan perizinan untuk melakukan eksplorasi terhadap Negara mereka.

Cina yang mendukung adanya eksistensi militer dalam pemerintahan Myanmar berarti juga telah mendukung politik Isolatif Myanmar. Dengan adanya sifat Isolatif Myanmar terhadap Negara – Negara lain selain Cina , memberikan keleluasaan bagi Cina untuk dapat memberikan pengaruh besarnya terhadap Myanmar serta mengambil keuntungan dari pengaruh tersebut tanpa adanya persaingan dari Negara lain.

2. Keuntungan Militer Myanmar dari Cina

Dalam hubungan kerjasama antara dua aktor atau lebih tentu masing-masing aktor akan mengharapkan keuntungan. Seperti halnya dengan kerjasama Cina dan Myanmar. Selain Cina yang diuntungkan melalui ketipuasaanya dalam mengekspolrasi kekayaan Myanmar, pemerintahan Myanmar pun mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan Cina.

Keuntungan yang diperoleh oleh Junta militer dalam kerjasama tersebut adanya bantuan dari Cina yang berupa suplai senjata untuk menambah kekuatan Junta militer dalam mengontrol banyaknya konflik etnis dinegara mereka serta untuk menekan golongan oposisi yang menginginkan adanya demokrasi di Myanmar dan akan mengancam posisi Junta militer di pemerintahan Myanmar. Berikut adalah tabel yang menyatakan adanya suplai senjata yang dilakukan Cina terhadap Myanmar.

Tabel 4.3

Suplai Persenjataan Cina ke Myanmar

Senjata	Tipe	Unit	Tahun Permintaan/Pengiriman	Keterangan
Pesawat Tempur	F-7	4	1996/1998	
Penyerang Bawah Tanah		21	1996/1998	
Trainer	K-8	4	1996/1998	
		4	1996/1998	
Frigate	Mod. Jianghu			1 Unit dikirim 1 Unit sedang dirancang

APC	Type-85	150	1991/1996	
MBT	Type-86	50	1993/1996	

Sumber: Military Balance (London: International Institute of Strategic Studies, 1998-99 and 2000-2001)

Dengan adanya dukungan yang diberikan oleh Cina berupa suplai senjata, Junta militer semakin percaya diri untuk tetap berkuasa di Myanmar. Selain itu juga Junta militer Myanmar senantiasa mendapat dukungan dari Cina. Seperti adanya sikap Cina yang senantiasa ingin memblokir upaya pengenaan sanksi terhadap dapat Myanmar. Terkait dengan demonstrasi di Myanmar yang menewaskan 13 orang, Cina dengan segala pengaruhnya berupaya melindungi Junta. Hal ini dibuktikan dalam draft resolusi DK PBB. Pada awalnya draft tersebut berisi pernyataan dari AS, Inggris, Perancis yaitu “DK mengecam keras represi oleh pemerintah Burma atas demonstrasi damai, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata atas figure dan lembaga religious”.⁴¹ Atas pengaruh Cina draft tersebut mengalami perubahan kata dari “mengecam” menjadi “menyesalkan” yang memperlunakan isi kalimat tersebut.

Selain itu banyaknya perusahaan – perusahaan Cina yang ada di Myanmar membuat Junta militer dapat mengeruk pendapatan yang besar yang berasal dari pajak yang dibayar oleh perusahaan milik Cina tersebut. Hal ini jelas akan mempertebal kantong - kantong militer.

Dengan adanya berbagai dukungan dari Cina hal tersebut membuat militer Myanmar semakin percaya diri untuk tetap berkuasa di Myanmar dengan politik Isolatifnya. Karena dengan menjalankan hubungan baik dengan Cina, Myanmar

⁴¹ *Koran Tempo*, “DK PBB Akan Bertemu Untuk Bahas Sikap Terhadap Myanmar”, 8 Oktober 2007.

mendapatkan keuntungan baik materi maupun dukungan untuk tetap bertahan dalam pemerintahan Myanmar.

BAB V

KESIMPULAN

Myanmar merupakan sebuah Negara di kawasan Asia Tenggara yang diapit oleh kekuatan besar yaitu India dan Cina. Myanmar juga menjadi bagian dari organisasi regional Asia Tenggara yaitu ASEAN sejak tahun 1997. Sebelum mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1948 Myanmar sempat dijajah oleh Inggris dan Jepang. Pada masa kemerdekaannya Myanmar menerapkan suatu system demokrasi dibawah komanda *Anti Fascist People's Freedom League* (AFPFL) yang dipimpin oleh Aung San. Akan tetapi setelah kematian Aung San yang ditembak mati oleh salah satu lawan politiknya muncul konflik internal dalam tubuh AFPFL yang menyebabkan adanya kekacauan politik di Myanmar.

Dalam sejarah Myanmar, Negara ini selalu diwarnai oleh konflik antar kelompok maupu etnis yang sangat mengkhawatirkan intergarasi bangsanya. Oleh karena itu diperlukan militer untuk mengontrol konflik tersebut. Pada awalnya peranan militer di Myanmar hanyalah untuk mencegah terjadinya Myanmar mengalami disintegrasi. Akan tetapi pada saat itu militer mulai memasuki pos – pos politik di Myanmar. Hal tersebut juga dikarenakan adanya perpecahan di dalam AFPFL sehingga militer menjadi satu – satunya organisasi yang kuat.

Pada akhirnya Myanmar jatuh sepenuhnya ketangan militer yaitu pada tahun 1962. Hal tersebut dikarenakan adanya kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win terhadap Perdana Menteri pada saat itu yaitu U Nu. Semenjak itulah Myanmar mengambil alih kendali politik serta menguasai segala aspek yang terdapat di Myanmar. Pada awal kepemimpinan militer, Myanmar memperlihatkan perkembangan kearah yang lebih positif. Akan tetapi lama – kelamaan terlihat keserakahan – keserakahan yang diperlihatkan oleh Junta militer serta ketidakmampuan Junta militer dalam mengurus perekonomian Myanmar karena pada dasarnya militer tidak mempunyai kemampuan tersebut. Sehingga menyebabkan adanya keterpurukan ekonomi di Myanmar dan kemiskinan yang semakin merajalela.

Kehancuran perekonomian Myanmar membuat rakyatnya sudah tidak tahan yang menyebabkan timbulnya berbagai demonstrasi yang melibatkan penduduk sipil Myanmar. Akan tetapi demonstrasi tersebut tidak menyebabkan adanya perubahan yang positif dalam pemerintahan Junta militer. Militer bahkan mengadakan perlawanan terhadap para demonstran yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Setelah adanya demonstrasi dan kritikan dari tokoh oposisi Aung San Suu Kyi, jenderal Ne Win digantikan oleh Sein Lwin yang mendirikan *The State Law Order Restoration* (SLORC), yang tidak lebih hanyalah pergantian kulit militer.

Pada era pemerintahan SLORC diadakan pemilu dengan system multipartai yang diselenggarakan pada tahun 1990. Dalam pemilu tersebut diikuti oleh beberapa partai seperti partai *National League for Democracy* pimpinan aung San Suu Kyi dan

National Unity Party yang merupakan wakil Junta militer serta sejumlah partai dari kelompok etnis di Myanmar. Pemilu tersebut dimenangkan oleh *National League for Democracy* akan tetapi kemenangan tersebut tidak diakui oleh pemerintahan militer. Hingga saat ini Myanmar masih dikuasai oleh rezim militer dibawah pemerintahan *State Peace and Development Council* (SPDC) pimpinan Jenderal Than Shwe.

Semenjak dipimpin oleh rezim militer pada tahun 1962, Myanmar dikenal mempunyai sifat politik yang Isolatif. Politik Isolatif merupakan sifat menutup diri dari dunia internasional. Sikap yang menutup diri yang dilakukan oleh Myanmar yaitu dengan adanya pembatasan dari berbagai hal yang datang dari luar. Kalangan pers, pengacara, dan kaum intelektual yang belajar diluar negeri dibatasi bahkan dilarang untuk menunjukkan aktivasnya diluar negeri. Pemerintah juga memberlakukan hal yang sama terhadap media asing yang ingin meliput kondisi Myanmar, pemerintah pun selalu mensortir media lokal terhadap berita – berita yang akan dipublikasikan.

Sebuah Negara yang cenderung bersifat Isolatif seperti Myanmar akan mempunyai sikap proteksionis terhadap ekonominya. Dalam ekonomi proteksionis, pemerintah ikut campur dalam menentukan pasar. Hal tersebut inilah yang menyebabkan adanya kekuasaan militer yang sangat besar terhadap perekonomian Myanmar. Aktifitas lain yang menunjukkan adanya politik Isolatif Myanmar yaitu

tidak adanya system demokrasi di Negara tersebut sehingga masyarakatnya tidak mempunyai hak dalam menyampaikan pendapat - pendapatnya.

Melihat adanya sifat Isolatif yang masih bertahan di mana era globalisasi sedang berlangsung, tentu saja militer Myanmar mempunyai alasan sendiri mengapa mereka tetap mempertahankan hal tersebut. Berdasarkan Model Aktor Rasional yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini, militer Myanmar mempunyai alasan yang rasional yaitu mendapatkan keuntungan – keuntungan dari usaha mereka untuk mempertahankan politik isolative tersebut. Serta mereka juga mempunyai alasan yang rasional tentang bagaimana kerugian yang mereka terima apabila mereka tidak mempertahankan sifat Isolatif tersebut.

Keuntungan yang diperoleh militer Myanmar dalam mempertahankan politik Isolatif tersebut adalah kekuasaan mereka dalam pemerintahan Myanmar. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa militer menjadi penguasa mutlak setelah adanya kudeta pada tahun 1962. Dengan bersifat Isolatif maka Myanmar tidak akan membiarkan urusan Negaranya dicampuri oleh pihak – pihak asing. Karena masuknya campur tangan pihak asing di Myanmar akan menyebabkan masuknya paham – paham yang dapat menggoyahkan kekuasaan Myanmar seperti paham Demokrasi. Akan tetapi di Myanmar sendiri tuntutan demokrasi telah lama digaungkan. Telah banyak masyarakat Myanmar yang pro demokrasi, golongan oposisi Myanmar adalah pihak yang senantiasa memperjuangkan perubahan kearah demokrasi di Myanmar. Militer

pun tidak tinggal diam dan melakukan tekanan terhadap oposisi hal tersebut diperlihatkan dengan menjadikan tokoh oposisi yaitu Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah. Kekuasaan politik merupakan keutungan bagi Junta militer karena dengan memegang kekuasaan politik Junta dapat membuat kebijakan – kebijakan yang lebih menguntungkan lagi.

Keutungan lain yang didapat militer Myanmar dari sifat Isolatif tersebut yaitu adalah kekuasaan ekonomi yang besar. Dengan tipe perekonomian yang bersifat proteksionis militer Myanmar bebas menjalankan perekonomian yang hanya menguntungkan mereka saja dan tidak memperdulikan nasib rakyatnya. Dengan adanya politik Isolatif dan Proteksi ekonomi Myanmar untuk menghindari adanya intervensi asing yang dapat menggoyahkan kekuasaan ekonomi militer di Myanmar.

Akan tetapi dalam politik Isolatif Myanmar tetap adanya pengaruh asing yang senantiasa mendukung kebijakan pemerintah Myanmar. Dalam hal ini pihak asing tersebut yaitu Cina. Dukungan yang diberikan oleh Cina berupa upaya mempertahankan kekuasaan Junta militer di Myanmar. Karena Cina merasa diuntungkan dengan penguasaan militer yang mengizinkan Cina melakukan eksplorasi di Myanmar. Selain itu dengan ketertutupan Myanmar terhadap pihak asing lainnya di luar Cina, membuat besarnya pengaruh Cina di Myanmar.